

**PERAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) BAKTI MAKMUR
DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI REGISTER 30
PEKON TERATAS KECAMATAN KOTA AGUNG KABUPATEN
TANGGAMUS TAHUN 2010**

(Skripsi)

Oleh

**Daniel Gultom
0616041025**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2012**

ABSTRACT

THE ROLE FARMER TEAM GROUP (GAPOKTAN) BAKTI MAKMUR IN MAINTAINING SOCIAL FOREST IN REGISTER 30 PEKON TERATAS, SUB DISTRICT KOTA AGUNG DISTRICT TANGGAMUS IN 2010

By

DANIEL GULTOM

Basically the concept of good governance is a realization of participative establishment concept. Good Governance as a new paradigm of the establishment has positioned to a wider participation space in its process. The good governance quality will be gained if there are interactions of each components of governance it self, that are state, private sector, and civil society organization. LSM as one of civil society, has important contribution in building social interactions, economics and politics, including to invite social community to have participation or establishment. This research is to describe and analyze the role of farmer team group (Gapoktan) Bakti Makmur In Maintaining Social Forest In Register 30 Pekon Teratas, Sub District Kota Agung, District Tanggamus In 2010. Method of research typed as descriptif research with qualitative aggregation. Data collecting technique in this research are observation, digest interview and documentation.

Based on the research result, the role of farmer team group (Gapoktan) Bakti Makmur In Maintaining Social Forest In Register 30 Pekon Teratas Sub District Kota Agung, District Tanggamus In 2010 had brought positive impact to social, economy, and ecology in areal HKm Bakti Makmur. The social positive impact can be seen from those things : dialogically relation between the group HKm and government and also other participant in order to make green forest and wealthy social. The decrease of grouping clash in maintaining the land, the clash solvement by internal group mechanism, and some discussion of the group to government in law towards the clash that couldn't be solved in internal group it self. While the economics impact can be

seen from the various plants grow in farming block includes high, mid and low. Kind of plants, and also the increase of land quality naturally. The attitudes from the whole participants had been realized to develop the purpose of quality works program. The cooperation between the member with government had help them to seeding and selling of harvest. The works of Gapoktan is good from democraton, participation, transparent, and accountability side eventhough it's not maximally done yet. This condition describes that the works of gapoktan had done good governance well.

This research recommend that 1) the needs of Gapoktan foundation quality to be improved, like as the quality of human resourch, or the member, socialization on works program and making structural web cooperational to have good works program, in spite of programs innovation will be more ureful and more active. 2) the needs of social participation by participate in making decision includes arranging works programs or doing the works program it self, and doing the rule of works programs like paying the routine fund are registering Gapoktan members legally.

Key Words : Role, Environmental View Establishment, And Good Governance.

ABSTRAK

PERAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) BAKTI MAKMUR DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI REGISTER 30 PEKON TERATAS KECAMATAN KOTA AGUNG KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2010

Oleh

DANIEL GULTOM

Sejatinya konsep *governance* yang baik merupakan wujud dari konsep pembangunan partisipatif. *Good governance* sebagai paradigma baru dalam pembangunan memposisikan ruang partisipasi lebih terbuka dalam proses pembangunan. Kualitas *governance* akan tercapai apabila kualitas interaksi yang terjadi anatar komponen *governance* yaitu negara (*state*), sektor swasta (*private sector*) dan organisasi kemasyarakatan (*civil society organization*) dapat terwujud. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai salah satu bentuk dari *civil society* yang kuat memiliki kontribusi penting dalam membangun interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Bakti Makmur dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Register 30 Pekon Teratas Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Tahun 2010. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian adanya Peran Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Bakti Makmur Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Register 30 Pekon Teratas Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 telah membawa dampak positif sosial, ekonomis dan ekologis di lingkungan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Bakti Makmur. Dampak positif sosial dapat dilihat dari beberapa hal berikut : mulai dari terciptanya hubungan dialogis dan harmonis antara kelompok Hkm dengan pemerintah dan pihak lain dalam rangka mewujudkan hutan lestari masyarakat sejahtera, menurunnya sengketa antar sesama anggota dalam pengelolaan hamparan, adanya penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui mekanisme aturan internal kelompok, Adanya usulan kelompok kepada instansi pemerintah yang berwenang untuk penegakkan hukum terhadap sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme aturan internal kelompok. Sedangkan dampak ekonomis terlihat dari adanya peningkatan pendapatan tunai rumah tangga anggota kelompok Gapoktan. Sedangkan

dampak ekologis terlihat dari munculnya keragaman tanaman yang tumbuh di blok budidaya meliputi tajuk tinggi, sedang, dan rendah; serta terjadi suatu

peningkatan kesuburan tanah secara organik. Perilaku yang mencakup peran dari beberapa pihak yang berkepentingan sudah terealisasi untuk pengembangan kualitas pencapaian tujuan program kerja. Jaringan kerja sama yang telah tercipta cukup membantu baik pengurus maupun anggota lain dalam penyuluhan, pembibitan maupun penjualan hasil panen. Kinerja Gapoktan yang terlihat baik dari segi Demokrasi, Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas telah dilakukan walaupun belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Keadaan ini menggambarkan kondisi kinerja Gapoktan telah menerapkan asas good governance dengan baik.

Penelitian ini merahayu Sulistiowati, S.Sos, M.Si
ekomendasikan bahwa 1) Perlunya peningkatan kualitas kelembagaan Gapoktan, seperti kualitas SDM baik pengurus maupun anggota, sosialisasi program kerja dan pembentukan jaringan kerja sama yang lebih terarah untuk menjalankan program kerja perlu dilakukan, agar inovasi-inovasi program lebih terarah dan lebih aktif. 2) Perlunya meningkatkan partisipatif masyarakat dengan ikut berpartisipasi baik dalam hal pengambilan keputusan termasuk dalam penyusunan program kerja maupun pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan aturan seperti pembayaran iuran dan pendaftaran anggota Gapoktan secara resmi.

Kata Kunci : Peran, Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Good Governance

**PERAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) BAKTI MAKMUR
DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI REGISTER 30
PEKON TERATAS KECAMATAN KOTA AGUNG KABUPATEN
TANGGAMUS TAHUN 2010**

Oleh

DANIEL GULTOM

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2012**

Judul Skripsi : PERAN GABUNGAN KELOMPOK TANI
(GAPOKTAN) BAKTI MAKMUR DALAM
PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAK-
ATAN DI REGISTER 30 PEKON TERATAS
KECAMATAN KOTA AGUNG KABUPAT-
EN TANGGAMUS TAHUN 2010.

Nama Mahasiswa : Daniel Gultom

Nomor Pokok Mahasiswa : 0616041025

Jurusan : Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dra.Dian Kagungan, M.H.
NIP. 196908151997032001

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Rahayu Sulistioningsih, S.Sos, M.SI
NIP. 1971101221995122002

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 15 Agustus 1988, anak bungsu dari empat bersaudara dari Bapak Tumpal Gultom dan Ibu Artaida Simanjuntak. Pendidikan Sekolah Dasar pada SD.Xaverius Way Halim Permai Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2000, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Xaverius Way Halim Permai diselesaikan pada tahun 2003, kemudian Sekolah Lanjutan Tingkat Atas pada SMAK BPK PENABUR diselesaikan tahun 2006, dan pada tahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswa pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).

Semasa menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Pada tahun 2006/2007 penulis tercatat sebagai anggota bidang Minat Bakat Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fisip Unila, kemudian pada tahun 2004/2005 sebagai Sekretaris Bidang Minat dan Bakat Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fisip Unila.

Penulis juga pernah mengikuti beberapa pelatihan, diantaranya Pelatihan Analisis Kebijakan Publik Himagara Fisip Unila tahun 2006 dan Pelatihan Evaluasi Kebijakan Tata Ruang Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2008, penulis mengikuti program D1 komputer di Griyacom. Pada tahun 2009, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kecamatan Gisting yang telah memberikan pengalaman berharga bagi penulis.

MOTTO

*“Berpeganglah pada didikan, Janganlah melepaskannya, Peliharalah dia,
Karena dialah Hidupmu”*

(Amsal 4:13)

*”Kebahagiaan Yang Saya Alami Bukanlah
Berarti Kesempurnaan”*

(Daniel)

P E R S E M B A H A N

*Dengan mengucapkan Puji Syukur Kepada Tuhan Yesus Kristus
Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:*

*Bapak dan Mama serta Seluruh Keluarga Ku tercinta yang selalu
memberikan yang terbaik untukku
Terima kasih atas segala cinta, pengorbanan, kesabaran, dan do'a dalam
menanti keberhasilanku.*

*My Honey atas Kesabaran, Pertemanan, Kasih Sayang, Dan
Kebersamaannya Selama Ini*

Naungan Ku HIMAGARA

Sahabat Ku Yang Selalu Memberi Warna dalam Hidup Ku

Para pendidik dan almameter tercinta....

SANWACANA

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan kasih-Nya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Skripsi ini ditulis berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap peran Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Bakti Makmur dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Register 30 Pekon Teratas Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Tahun 2010. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Rahayu Sulistioningsih, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Lampung, yang turut mendukung kelancaran dalam beberapa hal administratif penyusunan skripsi ini dan selaku pembimbing akademik yang senantiasa sabar dan konsisten dengan nasehat serta gagasan-gagasannya.

3. Ibu Dra.Dian Kagungan,M.H selaku pembimbing utama, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan, saran serta masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr.Bambang Utoyo S, M.S selaku penguji utama yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan kepada penulis.
5. Seluruh Dosen yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama penulis menjalani masa studi di Fisip Unila ini.
6. Segenap Karyawan Fisip Unila yang telah memberi kelancaran dan kenyamanan selama penulis menimba ilmu dan beraktivitas di kampus ini.
7. Bapak Ir.F.B.Karjiyono Selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus.
8. Bapak dan Ibu masyarakat, terutama para pengurus Gapoktan Bakti Makmur yang telah memberikan informasi kepada penulis.
9. Buat pacar terbaikku, Nova Lenny Octaviana Tambunan, terima kasih buat supportnya.
10. Teman-teman Administrasi Negara Angkatan 2006, Mora, Ferdy, Herman, Hafidzin, Puja, Sunu, Felix, Puja, Tibonk, Henong, Rina, Doni, Iqbal, Adit, Panji, Viko, Fatime, Ria, Ayu, Oneng, pokoknya semua deh,, makasie buat persahabatan kita...
11. Anak Negara 2005, Ware Syamsie, Randi, Katro, Gery.

12. Teman-Teman Gereja-Ku,, Gereja Pentakosta Indonesia (GPI).

13. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala kontribusi kebersamaan dan pembelajaran selama berproses mengenal hidup dan mencapai kehidupan.

Bandar Lampung, Mei 2012

Penulis

Daniel Gultom

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL
ABSTRAK
HALAMAN JUDUL

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran	8
B. Tinjauan Kelembagaan	9
C. Tinjauan HKm	11
1. Kebijakan dan konsep HKm	11
2. Peran dan Manfaat HKm	14
3. Prinsip-prinsip HKm	14
4. Tahapan-tahapan penyelenggaraan HKm	15
5. Azas-azas pengelolaan SDA dan lingkungan	16
6. Pola Pemanfaatan HKm	16
D. Tinjauan <i>Good Governance</i>	18
E. Kerangka Pikir	23

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	25
B. Fokus Penelitian	27
C. Lokasi Penelitian	28
D. Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data	33
G. Teknik Keabsahan Data	35

BAB IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kecamatan Kota Agung	39
B. Keadaan Umum Areal HKm Bakti Makmur	40
1. Letak Geografis.....	40
2. Iklim di wilayah kerja	41
3. Wilayah Kerja dan Aksesibilitas.....	41
4. Sosial Ekonomi Masyarakat	42
a) Pengelolaan Areal HKm	42
b) Kelompok Tani Hutan.....	42
c) Organisasi Pelaksana HKm.....	49

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian	51
A. Situasi (<i>Situation</i>).....	51
1. Program Kerja.....	52
2. Partisipasi Pengurus dan Anggota Gapoktan	54
3. Kemampuan Lembaga	56
4. Struktur Organisasi Kelompok	57
5. Keanggotaan Kelompok.....	58
6. Administrasi Keorganisasian Kelompok	59
B. Struktur (<i>Structure</i>)	59
C. Perilaku (<i>Behaviour</i>)	61
D. Kinerja (<i>Performance</i>)	63
5.2 Pembahasan.....	69
A. Situasi (<i>Situation</i>).....	69
B. Struktur (<i>Structure</i>)	73
1. Batas Yuridiksi	73
2. Hak Kepemilikan.....	74
3. Aturan Representasi	75
C. Perilaku (<i>Behaviour</i>)	75
D. Kinerja (<i>Performance</i>)	81

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	85
6.2 Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Chip Fay, ahli kebijakan dari World Agroforestry Centre, kebijakan pembangunan kehutanan yang sentralistik diyakini sebagian kalangan tidak begitu efektif menjaga kawasan hutan. Paradigma pengelolaan dan pembangunan hutan pada masa kini dan ke depan harus diubah dari orientasi kayu menjadi pengelolaan sumber daya hutan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Kebijakan pembangunan kehutanan harus beralih dari sentralistik menjadi desentralistik. Peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam kebijakan dan juga dalam pengelolaan sumber daya hutan, dapat mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan. Kebijakan kehutanan saat ini memberikan peluang nyata bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, dengan memberikan hak akses kepada masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pengelolaan hutan.

Melalui SK. Menhut Nomor 31/KPTs-II/2001 jo. P.Menhut No.37 Tahun 2007 jo. P.Menhut No.13 Tahun 2010 Tentang pengelolaan HKm (Hutan Kemasyarakatan), pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut mengelola lahan kawasan. Kebijakan HKm mengizinkan masyarakat untuk dapat mengelola sebagian dari sumberdaya hutan dengan rambu-rambu yang telah ditentukan. Masyarakat yang dipercaya membangun hutan dengan sistem berkelompok ini, akan mendapat imbalan oleh pemerintah dalam bentuk kepastian penguasaan lahan dengan jenis Izin Hak

Kelola (bukan hak kepemilikan). Pada saat ini, di beberapa tempat di Indonesia, telah banyak kelompok-kelompok tani yang berkegiatan dalam Pengelolaan HKm, termasuk beberapa diantaranya di Provinsi Lampung.

Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang dicanangkan oleh Departemen Kehutanan merupakan salah satu wujud kesungguhan pemerintah dalam paradigma pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan menjadikannya sebagai bagian dari kerangka pembangunan kehutanan nasional. Bagi pemerintah daerah, kebijakan tersebut menjadi suatu peluang untuk mensejahterakan masyarakat sekaligus menjaga fungsi kawasan hutan di wilayahnya.

Kebijakan HKm dikeluarkan sebagai bagian dari proses kebijakan kehutanan di berbagai daerah di Indonesia, dimulai dari SK Menteri Kehutanan No 622/Kpts-II/1995, yang kemudian direvisi menjadi No.677/Kpts-II/1998. SK 677/Kpts-II/1998 sempat mengalami revisi menjadi SK 865/Kpts-II/1999, dan kembali mengalami revisi dengan SK No 31/Kpts- II/2001, tentang Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Melalui SK 31/Kpts-II/2001, Bupati diberi kewenangan mengeluarkan ijin HKm di daerahnya dan mensyaratkan bahwa izin HKm dapat diberikan setelah keluar Surat penetapan areal kerja HKm oleh Menteri Kehutanan. Kebijakan HKm kembali mengalami penyempurnaan melalui P.37/Menhut- II/2007, P.18/Menhut-II/2009 dan NOMOR : P. 13/Menhut-II/2010.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tanggamus memiliki kawasan hutan seluas \pm 155.246,35 hektar yang tersebar di 11 (sebelas) register. Kawasan hutan tersebut berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu *pertama* hutan lindung seluas \pm 141.901,35 hektar yang tersebar di 10 (sepuluh) register dengan pengelolaan ditangani oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Tanggamus, *kedua*, Hutan suaka marga satwa seluas \pm 10.220 hektar, dan *ketiga*, cagar alam laut (CAL) seluas \pm 3.125 hektar yang dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS).

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kabupaten yang berupaya memberikan peluang kepada masyarakat sekitar hutan untuk mengelola hutan dengan sistem Hutan Kemasyarakatan (HKm) atas dasar Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) Republik Indonesia Nomor : SK.751/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Kawasan Hutan sebagai Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan seluas \pm 12.061,30 hektar di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung yang kemudian disambut oleh Bupati Tanggamus dengan menetapkan Surat Keputusan Bupati Nomor : B.155/39/12/2009 tentang penetapan kelompok tani HKm di Kabupaten Tanggamus sebanyak 20 (dua puluh) kelompok tani yang dapat mengelola kawasan hutan lindung. Salah satu dari kelompok tersebut adalah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bakti Makmur yang berlokasi di Register 30 Pekon Teratas, Kecamatan Kota Agung. Gabungan Kelompok Tani Bakti Makmur kemudian mendapatkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dari Bupati Tanggamus untuk mengelola kawasan hutan

lindung register 30 dengan surat keputusan Nomor : B.259/39/12/2009 tertanggal 11 Desember 2009 dengan jumlah anggota sebanyak 499 kepala keluarga dengan mengelola lahan seluas $\pm 1.081,83$ hektar (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanggamus).

Sebanyak 20 kelompok tani HKm di Kabupaten Tanggamus telah diberi IUPHKm, akan tetapi peran lembaga belum dianggap penting dalam upaya mengelola areal HKm, karena posisi strategis kelembagaan dalam suatu kegiatan belum memiliki dasar yang kuat. Oleh sebab itu, jika kegiatan dalam lembaga kelompok tani tersebut tidak dilakukan oleh banyak orang, dan tidak berdampak luas terhadap sumberdaya alam, lingkungan sosial, maka lembaga belum dianggap memiliki posisi strategis dan mampu didalam mencapai tujuan bersama.

Peran dan posisi strategis lembaga menurut Sanim (2006), adalah kelembagaan mempunyai peranan penting dalam masyarakat untuk mengurangi ketidakpastian dengan menyusun struktur yang stabil bagi hubungan manusia, karena lembaga merupakan gugus kesempatan bagi individu dalam membuat keputusan dan melaksanakan aktivitasnya.

Sedangkan menurut Suharno (2005), peran strategis kelembagaan hanyalah salah satu prasyarat bagi keberhasilan *Community Based Management (CBM)* atau pola dasar kelembagaan, diantaranya adalah kapasitas, teknik, keuangan, dan jejaring sehingga masyarakat tersedia informasi yang memungkinkan pembuatan keputusan yang berbasis pengetahuan dan *information based decision*.

Uraian diatas menjelaskan bahwa kemampuan lembaga sangat menentukan keberhasilan dari sebuah program, maka untuk mengetahui kemampuan lembaga kelompok tani diperlukan penilaian kemampuan lembaga setelah mendapatkan izin HKm. Kriteria tersebut yang paling mendasar yaitu terdapatnya lembaga kelompok tani yang mampu untuk mengelola areal HKm di Kabupaten Tanggamus. Tanpa adanya lembaga yang mampu untuk mengelola HKm mustahil tujuan dari HKm akan berhasil dicapai.

Suharno, (2005) menyatakan bahwa, keberhasilan suatu masyarakat dalam menjalankan pola sumberdaya alam yang berbasis masyarakat akan ditentukan oleh kemampuan kelembagaan setempat. Artinya, tingkat kesiapan kelembagaan dari masyarakat menjadi penentu bagi keberhasilan pola *Community Based Management* (CBM).

Sejalan dengan pelaksanaannya, pengelolaan HKm saat ini tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ditunjang dengan adanya lembaga kelompok tani yang kuat dan efektif. Kekuatan dan keefektifan lembaga kelompok tani HKm dapat terlihat dari kemampuan lembaga tani HKm itu sendiri. Kemungkinan yang terjadi jika lembaga kelompok tani tidak melakukan upaya penguatan kelembagaan dan hanya mengandalkan pembinaan dari pemerintah maka dikhawatirkan lembaga kelompok tani tidak akan mampu untuk menghadap tantangan kedepan dari pengelolaan HKm yang semakin berkembang.

Berdasarkan hasil pra riset yang peneliti lakukan di daerah Register 30 Pekon Teratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, masih terdapat beberapa kelemahan lembaga kelompok tani khususnya Gapoktan Bakti Makmur dalam pengelolaan HKm, salah satunya dalam hal Program Kerja. Program Kerja secara umum mencakup

perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program tahunan dan lima tahunan. Kurangnya koordinasi antara kelompok tani, masyarakat sebagai pelaku utama, dan Pemerintah serta pihak lain sebagai fasilitator, menyebabkan masih terkendalanya pencapaian tujuan dari Program Kerja kelompok.

Melihat permasalahan diatas, maka penelitian mengenai Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bakti Makmur untuk mengelola areal HKm di Kabupaten Tanggamus sangat dibutuhkan.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat berbagai permasalahan pada uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

“ Bagaimana Peran Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bakti Makmur dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus tahun 2010?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

“ Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bakti Makmur dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus tahun 2010?”

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan penambahan ilmu pengetahuan dalam khasanah Ilmu Administrasi Negara.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan proses implementasi kebijakan dan sebagai informasi dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sebagai salah satu upaya untuk fasilitasi HKm.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Istilah peran sering digunakan dalam beberapa penelitian, khususnya disiplin ilmu sosial. Menurut Margono Slamet (1985) peran adalah perilaku yang dilaksanakan seseorang yang menempati suatu peran dalam masyarakat. Agus Sujanto (1995) mendefinisikan peran sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berhubungan dengan kewajiban yang diembannya.

Menurut Soerjono Soekanto (1986), peran adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Peranan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau suatu lembaga maupun organisasi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam suatu komunitas.

Selanjutnya Soerjono Soekanto (1986), menyebutkan juga bahwa peranan paling sedikit mencakup tiga hal :

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep apa yang dilakukan oleh individu dalam

masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial dalam kemasyarakatan.

Menurut Taneko (1996), peran adalah kegiatan organisasi yang berkaitan dengan menjalankan tujuan untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Peran menurut pengertian ini menitikberatkan pada proses kegiatan, artinya kajian peran bertitik tolak pada mekanisme kerja organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang digariskan organisasi.

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya didalam masyarakat.

B. Tinjauan Kelembagaan.

Menurut Pakpahan (1990), kelembagaan merupakan suatu sistem yang kompleks, rumit, abstrak, yang mencakup ideologi, hukum, adat istiadat, aturan, kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungan. Berdasarkan studi tersebut, dikemukakan, kelembagaan merupakan suatu landasan pembangunan pertanian yang mendasari keputusan untuk produksi, investasi dan kegiatan ekonomi lainnya yang dibuat oleh seseorang, atau sebuah organisasi dalam konteks sosial atau saling berhubungan dengan pihak lain.

Menurut Schmidt (1987) dalam Kartodihardjo (2006), kelembagaan adalah:

“seperangkat ketentuan yang mengatur masyarakat, yang mana, mereka telah mendefinisikan bentuk – bentuk aktivitas yang dapat dilakukan oleh pihak tertentu terhadap pihak lainnya, hak-hak istimewa yang telah diberikan serta mengatur hubungan antar individu dan atau kelompok yang terlibat dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam tertentu.”

Menurut Pakpahan (1990), kelembagaan adalah inovasi manusia untuk mengatur dan mengontrol interdependensi antar individu atau kelompok masyarakat terhadap sesuatu, kondisi atau situasi melalui penetapan hak pemilikan (property right), aturan perwakilan (rule of representation), dan batas yuridiksi (jurisdictional boundary). Suatu kelembagaan baik sebagai aturan main maupun organisasi dicirikan oleh adanya tiga komponen utama tersebut. Sebelumnya Pakpahan (1989), menyatakan bahwa unsur – unsur kelembagaan meliputi tiga unsur utama, yaitu batas yuridiksi, hak kepemilikan, dan aturan representasi.

Noble (2000) berpendapat bahwa ;

“kelembagaan masyarakat menjadi salah satu kriteria penting bagi keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, selain itu kajiannya menyimpulkan bahwa keragaman kelembagaan lokal berpotensi baik sebagai faktor pendorong maupun faktor penghambat, maka diperlukan tinjauan, bahkan restrukturisasi kelembagaan agar tata kelembagaan setempat cocok dengan keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya adalah HKM.”

Menurut Persaki (2010) , kelembagaan yang dilatar belakangi oleh kesamaan kepentingan dan ikatan sosial maupun emosional akan menjamin kesatuan dari anggota lembaga. Artinya lembaga yang berbasis pada sistem dan tata nilai lokal akan lebih eksis dibanding lembaga yang bersifat *ad hoc* dan instan. Karakter tersebut juga mencerminkan pendekatan kelembagaan yang bersifat *bottom up* bukan *top down*.

Menurut Sanim(2006) dalam menganalisis kelembagaan secara deskriptif diperlukan analisis situasi (situation), struktur (structure), perilaku (behavior), dan kinerja (performance).

C. Hutan Kemasyarakatan (HKm)

1. Kebijakan dan Konsep HKm

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang menyebutkan tentang pengertian hutan, bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Menurut Permenhut nomor : P.37/Menhut-II/2007 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 (satu) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan kemasyarakatan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup (P.37/Menhut-II/2007, Pasal 4).

Kebijakan Permenhut nomor : P.37/Menhut-II/2007 pasal 6 dan pasal 7 menerangkan bahwa kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Kawasan hutan lindung dan hutan produksi dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan dengan ketentuan belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan, menjadi

sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

Dalam Permenhut tersebut proses pemberian izin jangka panjang pengelolaan HKm dapat dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan penetapan areal kerja HKm oleh Menhut, setelah ada usulan dari bupati. Ada dua jenis perizinan dalam pengelolaan HKm yang dijelaskan dalam Permenhut tersebut, yaitu :

- a. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) yang dikeluarkan oleh Bupati atau Gubernur untuk lintas kabupaten. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) merupakan izin usaha pemanfaatan hasil hutan selain kayu pada areal kawasan hutan lindung dan hutan produksi.
- b. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan kemasyarakatan (IUPHHKHKm) yang diberikan oleh Menhut dan Menhut dapat mendelegasikan pemberian izin itu kepada Gubernur. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Kemasyarakatan (IUPHHKHKm) merupakan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam areal IUPHKm pada hutan produksi.

Perbedaan pemanfaatan HKm di hutan produksi dan hutan lindung yaitu, kegiatan pemanfaatan HKm pada hutan produksi meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Sedangkan kegiatan pemanfaatan HKm pada di hutan lindung meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Sumadhijo (1997), berpendapat bahwa, Pengembangan hutan kemasyarakatan

berlandaskan pada visi tidak hanya sekedar memberikan alternatif agar masyarakat tidak merusak hutan, tetapi benar-benar diarahkan pada pemberian kesempatan dan kepercayaan kepada mereka untuk bersama-sama memanfaatkan sumberdaya hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan senantiasa memperhatikan sumberdaya alam setempat.

Menurut Yetty R (2003), sumberdaya hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sejalan dengan pokok-pokok pikiran tentang *Social Forestry* yaitu menempatkan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebagai pelaku utama pengelolaan hutan. Masyarakat di dalam dan sekitar hutan dengan kehidupan yang bersentuhan langsung dengan hutan, merasakan dampak keberadaan hutan secara langsung, baik dalam arti positif maupun negatif. Dengan demikian sangat beralasan menempatkan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebagai mitra utama pengelolaan hutan menuju hutan lestari.

Menurut penelitian Mulyaningsih (2007), bentuk kesejahteraan masyarakat yang nyata dapat dirasakan dengan adanya program HKM adalah berupa rasa aman. Rasa aman oleh penduduk dianggap sebagai bentuk kesejahteraan yang penting. Dengan rasa aman yang sekarang dimiliki masyarakat di dalam menggarap hutan, merupakan modal bagi upaya peningkatan kualitas dan kuantitas hutan. Dalam jangka panjang hal ini akan berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga. Peningkatan kualitas dan kuantitas hutan akan berdampak pada peningkatan ekonomi daerah, seperti melalui penarikan retribusi hasil hutan.

2. Peran dan Manfaat Hutan Kemasyarakatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan no31/kpts-II/2001, HKm bertujuan memberdayakan masyarakat di dalam pengelolaan hutan dalam meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjamin kelestarian fungsi hutan dan ekosistemnya. Selain manfaat ekologis dan ekonomi yang ingin didapatkan dari pelaksanaan HKm, peran HKm adalah:

- a. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan, kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat.
- b. Meningkatkan komunitas masyarakat pengelola HKm.
- c. Meningkatkan keanekaragaman hasil hutan yang menjamin kelestarian fungsi dan manfaat hutan.
- d. Meningkatkan produktivitas dan keamanan hutan.
- e. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan negara.
- f. Mendorong serta mempercepat pengembangan wilayah.

3. Prinsip-Prinsip Hutan Kemasyarakatan

Prinsip-Prinsip Hutan Kemasyarakatan berdasarkan Permenhut nomor : P.37/Menhut-II/2007 adalah:

- a. tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
- b. pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil kegiatan penanaman;

- c. mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya;
- d. menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan;
- f. memerankan masyarakat sebagai pelaku utama;
- g. adanya kepastian hukum;
- h. transparansi dan akuntabilitas publik;
- i. partisipatif dalam pengambilan keputusan.

4. Tahapan-Tahapan Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan

Adanya penyesuaian kondisi dan peraturan kebijakan di Indonesia maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan HKm.

Adapun tahapan-tahapan penyelenggaraan HKm adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan wilayah pengelolaan HKm oleh Menteri Kehutanan melalui inventarisasi dan identifikasi.
- b. Penyiapan masyarakat melalui fasilitasi yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan sampai masyarakat tersebut memahami hak dan kewajibannya untuk mengelola HKm secara bersama-sama dan partisipatif.
- c. Pemberian izin yang diberikan dalam 2(dua) tahap:
 - 1) Izin sementara untuk jangka waktu 5 tahun pertama sampai terbentuknya masyarakat secara mandiri yang berbadan hukum baik dalam bentuk koperasi maupun lembaga lainnya.
 - 2) Izin definitif untuk jangka waktu 35 tahun yang dapat diperpanjang

tergantung hasil evaluasi setiap 5 tahun.

- d. Pengelolaan HKm meliputi penataan areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi dan perlindungan.
- e. Pengendalian, baik yang dilakukan oleh kelompok (internal) pemerintah dan masyarakat luas.

5. Azas-Azas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan.

Azas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, serta mencegah terjadinya potensi kerusakan dan memperbaiki, memulihkan krisis lingkungan dengan tetap melakukan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan sumberdaya alam dan lingkungan agar dapat berfungsi untuk kemakmuran rakyat dan tetap lestari.

Berdasarkan Permenhut nomor : P.37/Menhut-II/2007 azas penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan adalah:

- a. manfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya;
- b. musyawarah-mufakat;
- c. keadilan.

6. Pola pemanfaatan hutan kemasyarakatan

Berdasarkan jenis komoditas, perusahaan HKm memiliki pola yang berbeda untuk setiap status kawasan hutan di sesuaikan dengan fungsi utamanya yaitu:

- a. Pola HKM pada kawasan hutan produksi yang dilaksanakan dengan cara mengusahakan hasil hutan kayu, hasil hutan non kayu dan komoditi lainnya, serta jasa rekreasi lingkungan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk diusahakanyang meliputi kegiatan penanaman, pemungutan, dan pemasaran yang berpedoman pada azas kelestarian.
- b. Pola HKM pada kawasan hutan lindung yang dilaksanakan untuk pengusahaan hutan non kayu dan jasa rekreasi, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk diusahakan dengan tidak mengganggu fungsi kelestarian sumberdaya air, perlindungan kesuburan tanah, dan lingkungan serta pengusahaannya dapat berupa obyek wisata yang memanfaatkan lingkungan alam baik hutannya, sungai, danau, rawa, pantai, pesisir, dan pulau. Pada kawasan hutan lindung tidak diperkenankan pemungutan hasil hutan kayu baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk diusahakan.
- c. Pola HKM pada kawasan pelestarian alam yang dilaksanakan untuk perlindungan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, yang pada hakekatnya perlindungan terhadap plasma nutfah. Oleh karena itu kegiatan HKM pada kawasan pelestarian alam terbatas pada pengelolaan jasa lingkungan khususnya jasa wiasata. Pemilihan komoditas ditentukan berdasarkan kepentingan kehutanan dan kebutuhan masyarakat secara seimbang dan dinamis baik untuk jenis kayu, non kayu, maupun jasa lingkungan.

Kawasan yang dapat dijadikan areal HKm adalah kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung dan kawasan pelestarian alam pada zonasi tertentu yang tidak dibebani hak-hak lain di bidang kehutanan. HKm di Kabupaten Tanggamus adalah termasuk dalam kawasan hutan lindung maka proses pemanfaatan HKm dilakukan sebagai fungsi hutan lindung dengan manfaat hasil hutan berupa non kayu dan jasa rekreasi. Dengan demikian pendapatan anggota dari kegiatan yang dilakukan dalam pemanfaatan HKm di Kabupaten Tanggamus harus tetap dengan mempertimbangkan dan diarahkan pada fungsi tersebut di atas.

D. Tinjauan Mengenai *Good Governance*

Secara terminologis *governance* dimengerti sebagai pemerintahan, sehingga masih banyak yang beranggapan bahwa *governance* adalah sinonim *government*. Interpretasi dari praktik-praktik *governance* selama ini memang lebih banyak mengacu pada perilaku dan kapabilitas pemerintah, sehingga *good governance* seolah-olah otomatis akan tercapai apabila ada *good government*.

Sejatinya konsep *good governance* harus dipahami sebagai suatu proses bukan struktur atau instansi. *Governance* juga menunjukkan inklusivitas. Kalau *government* dilihat sebagai "mereka", maka *governance* adalah "kita". Menurut Leach & Percy-Smith (2001), *Government* mengandung pengertian politisi dan pemerintahlah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan, sementara sisa dari "kita" adalah penerima yang pasif. Sementara *governance* meleburkan perbedaan antara "pemerintah" dan

”yang diperintah”, kita semua adalah bagian dari proses *governance*.

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktik, dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan. Implikasinya peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain dikomunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pula pada peran warga. Ada tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintah itu sendiri.

Ghanie Rochman mengartikan *governance* sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor publik (negara), sektor swasta dan masyarakat dalam suatu usaha kolektif. Hal ini membuktikan bahwa *governance* tidaklah dijalankan secara dominan oleh aktor tunggal, akan tetapi melibatkan beberapa aktor lainnya yakni sektor privat dan partisipasi masyarakat.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, *Governance* dapat diartikan sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan

menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Governance mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda. Meskipun mengakui ada banyak aktor yang terlibat dalam proses sosial, *governance* bukanlah sesuatu yang terjadi secara *chaotic, random* atau tidak terduga. Ada aturan-aturan main yang diikuti oleh berbagai aktor yang berbeda. Salah satu aturan main yang penting adalah adanya wewenang yang dijalankan oleh negara. Tetapi harus diingat, dalam konsep *governance* wewenang diasumsikan tidak diterapkan secara sepihak, melainkan melalui semacam konsensus dari pelaku-pelaku yang berbeda. Oleh sebab itu, karena melibatkan banyak pihak dan tidak bekerja berdasarkan dominasi pemerintah, maka pelaku-pelaku diluar pemerintah harus memiliki kompetensi untuk ikut membentuk, mengontrol, dan mematuhi wewenang yang dibentuk secara kolektif.

Dalam konteks pembangunan, definisi *governance* diartikan sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan diharapkan tidak lagi sekedar apa yang baik oleh pemerintah, tetapi yang lebih utama adalah apa yang baik serta yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Governance dipandang sebagai paradigma baru dan menjadi ciri yang perlu ada dalam sistem administrasi publik. Secara umum *governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya. *Governance* mencakup 3 (tiga) domain yaitu *state* (negara atau pemerintahan), *private*

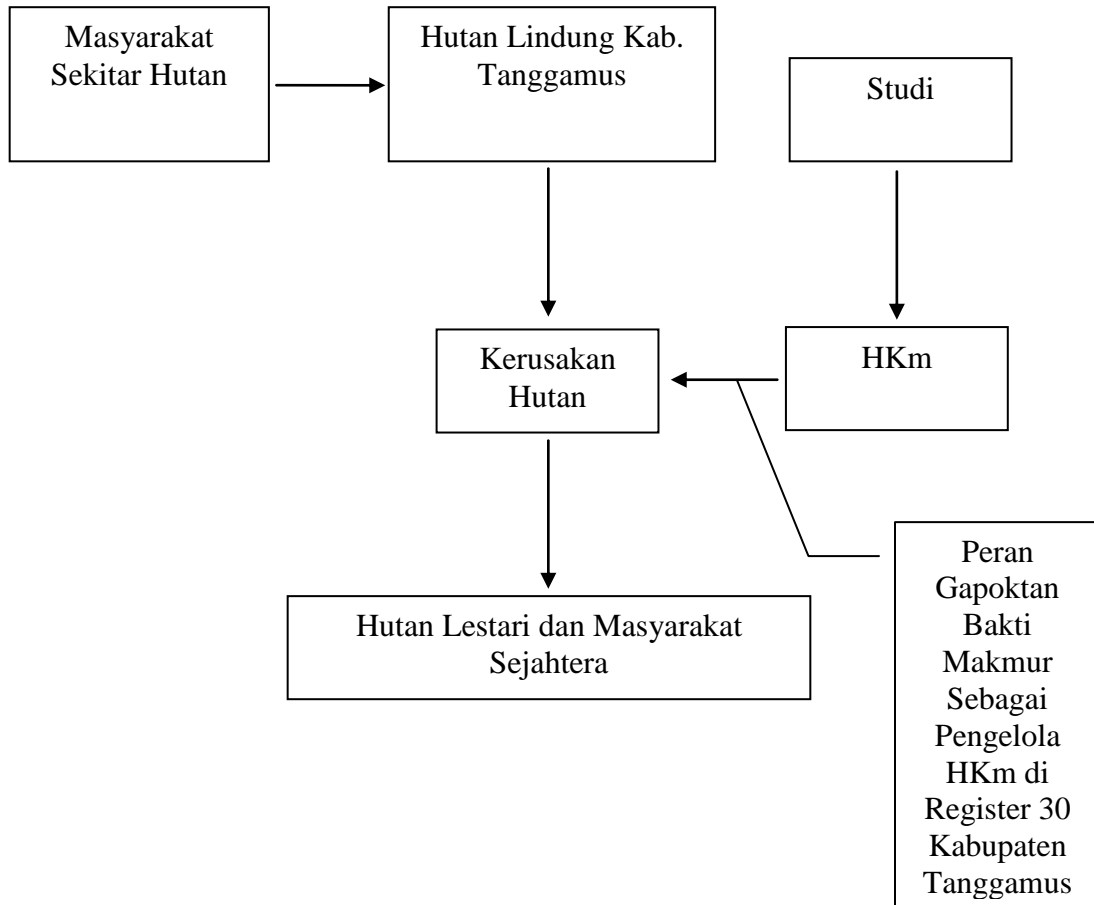
sectors (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Oleh karena itu, *Good Governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholders, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Dengan bergesernya paradigma dari *government* ke arah *governance*, yang menekankan kolaborasi dalam kestaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik disebut pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Bob Sugeng Hadiwanata, syarat bagi terciptanya *good governance*, yang merupakan prinsip dasar yakni :

1. Partisipatoris; setiap pembuatan peraturan dan atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya).
2. *Rule of law*; harus ada perangkat hukum yang menindak para pelanggit, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga.
3. Transparansi; adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang-undang). Ada ketegasan antara rahasia negara dengan informasi yang terbuka untuk publik.
4. *Responsive*; lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan "basic needs" (kebutuhan dasar) dan HAM (hak sipil, hak politik, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya).

5. Konsensus; jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog/musyawarah menjadi konsensus.
6. Persamaan hak; pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, dilibatkan di dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan.
7. Efektifitas dan efisiensi; pemerintah harus efektif (absah) dan efisien dalam memproduksi output berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara, dll.
8. Akuntabilitas; suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis, yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi terhadap tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan.

E. Kerangka Pikir



Gambar 1. Diagram alir kerangka pikir penelitian

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Di dalam kawasan hutan lindung register 30 kabupaten Tanggamus sudah terdapat masyarakat sejak tahun 1980, meskipun menurut undang-undang yang berlaku masyarakat tidak diperbolehkan berada di dalam kawasan hutan lindung. Jika

sumberdaya hutan terus diekplorasi secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sekitar tanpa ada manajemen yang baik maka hutan terancam rusak sehingga masyarakat menanggung dampaknya yang lebih besar.

Dampak dari rusaknya hutan yaitu banjir, longsor, kekeringan, punahnya keanekaragaman hayati, sumber perekonomian petani hutan hilang, sehingga akan berdampak pada tidak tercapainya hutan yang lestari untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan menjadi salah satu solusi untuk tetap mempertahankan fungsi dan manfaat dari hutan di register 30 tersebut yang seiring dengan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat.

Program HKm tersebut tidak serta merta diberikan, tetapi harus melalui beberapa tahapan yang harus dilalui oleh para pengelola HKm, salah satunya yaitu membentuk kelompok tani HKm yang bertujuan untuk mencapai tujuan program HKm yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Gapoktan Bakti Makmur merupakan salah satu lembaga kelompok tani yang memiliki IUPHKm. Dengan peran maksimal yang dilakukan oleh setiap lembaga kelompok tani, diharapkan mampu untuk mewujudkan tujuan program Hkm. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat secara khusus sejauh mana Peran Gapoktan Bakti Makmur dalam pengelolaan Hkm. Dibutuhkan suatu penelitian tentang kemampuan lembaga kelompok tani yang menjadi salah satu kunci keberhasilan program HKm agar dapat dijadikan acuan bagi keberlangsungan program HKm dimasa yang akan datang.

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian yang berupaya menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan apa adanya. Dalam penelitian ini analisis data akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini sering dikenal dengan istilah Penelitian kualitatif, yakni penelitian yang berusaha untuk mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Bertitik tolak dari hal itu, menurut Lincoln dan Guba (1985) penelitian kualitatif berusaha melihat, mengetahui, serta menggambarkan fenomena tertentu terhadap suatu masyarakat berdasarkan apa adanya, sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Pendekatan kualitatif nantinya diharapkan dapat mengungkapkan peristiwa riil di lapangan dan metode kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian ini.

Pendekatan kualitatif berasumsi bahwa manusia adalah makhluk yang aktif, yang mempunyai kebebasan kemauan, yang perilakunya hanya dapat dipahami dalam konteks budayanya, dan yang perilakunya tidak didasarkan pada hukum sebab akibat. Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan peristiwa sebagai data yang akan dianalisis. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bermaksud memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap fenomena yang terjadi melalui proses wawancara mendalam dan observasi partisipasi

dalam memahami makna fenomena yang ada tersebut serta makna simbolis di balik realita yang ada. Oleh karena itu penelitian ini akan menitik beratkan pada upaya untuk memberikan deskripsi (gambaran) umum secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat fenomena yang diselidiki dari suatu objek penelitian serta dipaparkan dengan apa adanya.

Dalam Moleong (2005) metode kualitatif yang didefinisikan oleh Bodgan dan Taylor adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya menurut Strauss (1990), dalam Penelitian Kualitatif perlu dilakukan diskusi dengan sesama anggota Tim. Hal ini sangat diperlukan sebab dengan membicarakannya dengan orang lain maka dimungkinkan untuk menemukan beberapa point yang belum terungkap, menambahkan poin-poin yang diperlukan serta mengecek poin-poin tersebut. Mereka juga dapat membandingkan dugaan analisis dengan ide mereka sendiri dan ilmu pengetahuan pada data. Perbandingan ini akan mampu membangkitkan ide-ide teoritis.

Lebih lanjut Sugiyono (2005) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari *generalisasi*.

Dengan demikian penelitian deskriptif penelitian yang menggambarkan secara terperinci dari kejadian-kejadian atau peristiwa yang berdasarkan fakta dan data yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Sedangkan jika dikaitkan dengan penelitian ini, peneliti bermaksud mendeskripsikan kejadian empiris peran Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bakti Makmur dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Kabupaten Tanggamus, Lampung.

B. Fokus Penelitian

Untuk dapat menyelesaikan masalah yang diajukan dalam penelitian ini secara tepat, maka diperlukan upaya-upaya pembatasan dan pemfokusan terhadap data-data yang ada di lapangan. Sehingga pembahasan yang dilakukan nantinya bisa menghindari sikap bias peneliti dalam melakukan analisa data.

Secara sederhana fokus penelitian adalah hal-hal ataupun fenomena yang menjadi pusat perhatian dari seorang peneliti. Menurut Sanim(2006) dalam menganalisis kelembagaan secara deskriptif diperlukan analisis situasi (situation), struktur (structure), perilaku (behavior), dan kinerja (performance). Fokus dalam penelitian berkaitan erat, bahkan sering disamakan dengan masalah yang dirumuskan dan menjadi acuan dalam penentuan fokus penelitian.

Dengan bersandarkan pada teori Sanim (2006) di atas maka yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah Peran Lembaga Kelompok Tani (Gapoktan) Bakti Mandiri dalam mengelola areal HKM, yang saat ini telah berjalan setelah diberikan izin mengelola oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan menganalisis kelembagaan secara deskriptif melalui analisis:

1. Situasi (Situation), menganalisis karakteristik yang melekat pada sumber daya untuk menyajikan data dan informasi yang sesuai dengan kondisi nyata di lokasi penelitian.
2. Struktur (structure), menjelaskan kepemilikan terhadap sumber daya dengan mengetahui unsur-unsur kelembagaan, antara lain:
 - a) Batas Yuridiksi, yaitu batas wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki oleh suatu lembaga.
 - b) Hak Kepemilikan, yaitu aturan yang diatur oleh hukum (formal), adat dan tradisi (non formal), atau konsensus yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat dalam hal kepentingan terhadap sumber daya.
 - c) Aturan Representasi, yaitu mengatur permasalahan siapa yang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
3. Perilaku (Behaviour), meninjau perilaku dari masing-masing pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat dan bagaimana kepentingannya terhadap suatu sumber daya yang ada.
4. Kinerja (Performance), menggambarkan kondisi pengelolaan terhadap sumber daya hutan, apakah sudah cukup baik atau belum.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*), Penetapan lokasi penelitian dilakukan pada Lembaga Kelompok Tani (Gapoktan) Bakti Mandiri sebagai salah satu pengelola areal HKM. Luas areal kerja Gapoktan Bakti

Makmur adalah ±1.081,38 ha, yang terdiri dari 936,04 ha dikelola oleh kelompok tani dan sisanya 145,4 ha adalah lahan kosong dan hutan primer yang belum dikelola oleh masyarakat. Letak wilayah kerja Gapoktan Bakti Makmur berada di register 30 Pekon Teratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus.

Pemilihan lokasi Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus karena Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu daerah percontohan Hutan Kemasyarakatan di Indonesia. Lokasi wilayah kerja Gapoktan Bakti Makmur khususnya sekretariat Gapoktan Bakti Makmur memiliki akses jalan yang masih bisa ditempuh dengan kendaraan roda empat atau roda dua pada umumnya.

D. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2005) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data karakteristik masyarakat, meliputi ; identitas responden (jumlah anggota keluarga, lama tinggal, jarak tempat tinggal dengan lokasi hutan), jenis komoditas (kayu dan non kayu) yang diusahakan di lokasi, sumber pendapatan, pengetahuan masyarakat tentang sumber daya dan tradisi/norma yang berlaku, dan gambaran umum mengenai kejadian atau peristiwa yang berdasarkan fakta dan data yang terjadi saat melakukan penelitian.

2. Data Sekunder.

- a) Data keadaan umum lokasi penelitian yang merupakan karakteristik suatu kelompok yang meliputi profil desa, keadaan sosial ekonomi masyarakat, keadaan fisik dan biologi, yang bersumber dari data di aparat desa maupun pemerintah daerah atau propinsi setempat.
- b) Data-data lain yang didapat dari hasil penelitian dan publikasi yang telah ada, baik dari majalah, koran, internet dan buku-buku yang menunjang penelitian.
- c) Data kerangka, aturan kelembagaan, meliputi aturan-aturan dalam mengakses sumber daya, aturan-aturan dalam mengambil sumber daya, aturan pemantauan dan pemberian sanksi, struktur hukuman/sanksi, aturan mekanisme resolusi konflik, status kepemilikan lahan dan hak-hak atas lahan, perundangan mengenai HKm, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok, perundangan lain yang relevan termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Strategis Kabupaten Tanggamus.
- d) Data karakteristik fisik teknis sumber daya, meliputi ; luas areal lahan kelola masyarakat, kejelasan batas areal, kapasitas sumber daya, produksi tanaman yang diusahakan, kondisi penutupan lahan.
- e) Data kelembagaan kelompok, meliputi nama kelompok, anggota kelompok, pengurus kelompok, luas areal kelola kelompok, alamat Gapoktan, struktur organisasi.

Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Informan

Sumber data ini merupakan orang-orang terlibat atau mengalami proses pelaksanaan dan perumusan program di lokasi penelitian. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah:

- a) Pengurus Gapoktan Bakti Makmur
- b) Tokoh Masyarakat di lingkungan Pekon Teratas
- c) Masyarakat pengelola HKm Gapoktan Bakti Makmur di kawasan Register 30 Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus..
- d) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tanggamus

2. Dokumen-dokumen

Sumber data ini merupakan berbagai dokumen yang ada hubungannya dengan pelaksanaan program Hutan Kemasyarakatan (HKm) seperti surat-surat keputusan, arsip-arsip dan dokumen lain yang mendukung, seperti:

- a) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.
- b) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2009 perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-Ii/2007 Tahun 2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan.
- c) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2010 perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-Ii/2007 Tahun 2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan.

- d) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2011 perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-Ii/2007 Tahun 2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan.
- e) SK.433/Menhut-2/2007 tentang penetapan areal kerja Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah ditetapkan berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer yang diperlukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Menurut Nasution (1988) dalam Sugiyono (2005) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati kemampuan Lembaga Kelompok tani (Gapoktan) Bakti Makmur sebagai pengelola HKm.

2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong: 2005). Wawancara yaitu mengumpulkan data primer dengan jalan mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan peran Gapoktan Bakti Makmur sebagai salah satu pengelola HKm.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan pada jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, maka dari data yang terkumpul, akan dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan cara melukiskan hasil penelitian hasil penelitian dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat sehingga dengan demikian penulis menguraikan secara mendalam hasil penelitian tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan.

Setelah data terkumpul maka harus dilakukan analisis terhadap data yang ada itu. Untuk melakukan analisis maka digunakan apa yang disebut teknik analisa data. Teknik Analisa Data merupakan cara atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolah data, baik primer maupun skunder, sehingga data-data yang terkumpul akan diketahui manfaatnya, terutama dalam memecahkan permasalahan penelitian. Dengan demikian maka perhatian utama dari analisa data ini adalah dari kata, ungkapan, kalimat maupun perilaku dari objek penelitian.

Dalam Penelitian kualitatif, analisis dan tafsiran data tidak hanya dilakukan pada akhir pengumpulan data atau berdiri sendiri. Namun secara simultan juga dilakukan pada saat pengumpulan data di lapangan berlangsung, sehingga penelitian kualitatif dikenal sebagai proses siklus.

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2005) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data pada penelitian kualitatif meliputi tahap-tahap sebagai berikut (Milles and Huberman, 1992):

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Laporan atau data di lapangan dituangkan dalam uraian lengkap dan terperinci. Dalam reduksi data peneliti dapat menyederhanakan data dalam bentuk ringkasan

2. Penyajian Data

Peyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “*grounded*”, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) atas keandalan (*realibilitas*). Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data. Menurut Moleong (2004) ada beberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu:

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan nonkualitatif. Fungsi dari derajat kepercayaan: pertama, penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan

hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu :

a. Triangulasi

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan. Adapun triangulasi yang dilakukan dengan tiga macam teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber data, metode, dan teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan :

- 1) mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
- 2) mengeceknya dengan berbagai sumber data
- 3) memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Tabel Triangulasi

Objek Penelitian	Wawancara	Data	Observasi	Kesimpulan
Peran Gapoktan Bakti Makmur Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Register 30 Kabupaten Tanggamus	Ir.F.BKarjiono : “Gapoktan Bakti Makmur termasuk kelompok lembaga yang mandiri dan kuat dalam melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan .” (18 April 2011)	Adanya kapasitas lembaga gapoktan Bakti makmur yang cukup memadai merupakan daya dukung Gapoktan Bakti	Adanya Gapoktan Bakti makmur serta dukungan dari berbagai pihak telah	Peran Gapoktan Bakti Makmur Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Register 30

	<p>Tokoh Masyarakat : “Adanya Gapoktan Bakti Makmur sangat membantu dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di kawasan Register 30 ” (21 April 2011)</p> <p>Bpk.Khoirudin (pengurus Gapoktan) : “Kalau kita hanya mengandalkan pemerintah saja gak balance artinya tidak ada penyeimbang.” (20 April 2011)</p>	<p>Makmur dalam mengupayakan peranannya dalam melakukan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan untuk mewujudkan hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat petani hutan.</p>	<p>membawa dampak positif sosial, ekonomis dan ekologis di lingkungan Hkm Bakti Makmur,</p>	<p>Kabupaten Tanggamus dinilai cukup efektif</p>
<p>Dampak kebijakan HKm Gapoktan Bakti Makmur</p>	<p>Tokoh Masyarakat: “Selama ini penghasilan saya sebagai buruh tani sangat kecil apalagi saya cuma punya pengetahuan tentang penanaman, perawatan, dan pemanenan seadanya, dengan adanya HKm lahan yang ada telah diatur, pembibitan dan penyuluhan dibantu pemerintah, jadi penghasilan tiap proses pemanenan jadi bertambah” (24 April 2011)</p> <p>Bpk.Suman Effendy, Ketua Gapoktan “Dengan adanya program HKm, anggota Gapoktan banyak terbantu, baik dari segi sosial, ekonomi , maupun ekologis.” (20 April 2011)</p>	<p>Program Hutan Kemasyarakatan merupakan program yang berpihak kepada masyarakat sekitar hutan, program ini dikembangkan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat salah satunya peningkatan pendapatan masyarakat.</p>	<p>Gapoktan Bakti Makmur melalui izin yang telah dimiliki menjadi wadah bagi seluruh anggota Gapoktan maupun penyalur dari Dishutbun untuk mencapai tujuan utama HKm.</p>	<p>Kebijakan HKm dapat dikatakan berhasil dalam pencapain tujuannya mensejahterakan masyarakat, anggota Gapoktan khususnya.</p>

b. Kecukupan referensial

Yaitu mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

2. Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada pengamatan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti perlu mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama. Dengan demikian, peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Kebergantungan merupakan substitusi reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif. Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya. Kalau proses penelitiannya tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *dependable*.

4. Kepastian (*confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan,

sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian dikaitkan dengan proses yang dilakukan dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian tidak lagi subjektif tapi sudah objektif.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kecamatan Kota Agung

Luas Kecamatan Kota Agung seluas 269 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 85.000 jiwa. Di Kota Agung, terdaftar 6 (enam) kelurahan dan 20 (dua puluh) desa,

Tabel Lokasi Penelitian

Kecamatan	Kelurahan	Desa
Kota Agung	Kuripan Kota, Baros, Pasar Madang, Terbaya Barat, Kusa, Negri Ratu.	Terbaya Timur, Kota Agung, Kerta, Teba, Kagungan, Umbul Buah, Menggala, Ketapang, Kampung Baru, Batu Keramat Atas, Batu Keramat Bawah, Kota Batu, Way Gelang, Terdana, Way Panas, Kanyangan, Belu, Negara Batin, Kedamaian, Campang Tiga.

Sumber : Data Dishutbun 2010

Kota Agung adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat pemerintahan (ibu kota) Kabupaten Tanggamus dan merupakan kota terbesar di Kabupaten Tanggamus. Kota Agung terletak di kaki Gunung Tanggamus dan sisi pantai Teluk Semangka yang merupakan daerah administratif dan terbagi menjadi 3 kecamatan, yakni Kota Agung Pusat, Kota Agung Timur dan Kota Agung Barat.

Kota Agung Barat wilayah sebelah utara berbatasan dengan Gunung Tanggamus, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wonosobo, sebelah timur dengan Gisting

dan sebelah selatan dengan Teluk Semangka. Menurut catatan administrasi kolonial, Kota Agung didatangi oleh Belanda sejak tahun 1889. Banyak objek wisata di kota kecil ini, antara lain, Pantai Terbaya, Pantai Marina dermaga 1, 2 dan 3 yang selalu ramai pada hari libur khususnya hari minggu, Air Terjun Lamuran, Air Terjun Bukit Tinggi, Air Terjun Sinar Lebak, Pemandian Air Panas (Way Panas), Air Terjun Way Kandis, Taman Kota, Kompleks Islamic *Centre*, Teluk Semangka sebagai pusat pelelangan ikan, dan Air Terjun Way Lalaan. (Profil kecamatan Kota Agung, 2010)

B. Keadaan Umum Areal HKM Bakti Makmur di Pekon Teratas

1. Letak Geografis Wilayah Kerja Gapoktan Bakti Makmur.

Luas areal kerja Gapoktan Bakti Makmur adalah \pm 1.801,38 ha, yang terdiri dari 936,04 ha dikelola oleh kelompok tani dan sisanya 145,34 ha adalah lahan kosong dan hutan primer yang belum dikelola oleh masyarakat. Letak wilayah kerja Gapoktan Bakti Makmur berada di register 30 Pekon Teratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah marga Pekon Penanggungan.
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Tanggamus.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Gisting
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Teratas.

Areal Kerja Gapoktan Bakti Makmur terletak pada ketinggian 400-800 meter di atas permukaan laut dengan keadaan topografi yang bervariasi mulai dari daratan,

perbukitan dan lereng ada di areal kerja HKm. Lahan di areal kerja HKm terdiri dari 20% lahan dengan kemiringan 50°-70°, 40% daratan dan 40% sisanya merupakan areal berbukit yang sebagian besar diolah masyarakat untuk tanaman budidaya. Areal yang memiliki kemiringan terjal ditepian sungai tidak digunakan untuk menanam tanaman yang dibudidayakan oleh masyarakat karena kondisi tanah sangat bervariasi mulai dari tanah yang subur hingga tanah yang tandus, akan tetapi sebagian besar tanah masih bersifat subur. (Data Dishutbun Tanggamus, 2010)

2. Iklim di Wilayah Kerja

Wilayah kerja kelompok tani Bakti Makmur memiliki iklim dengan curah hujan berkisar 2000-7000mm per tahun, dengan bulan kering dari 3-5 bulan per tahun. Sementara kelembaban udara atau *Relative Humidity* (RH) mencapai 50-80% dengan suhu 25°-32°C. Bulan basah terjadi pada pertengahan dan akhir tahun, yaitu pada bulan November hingga bulan Mei, sedangkan bulan kering terjadi pada bulan Juli sampai dengan pertengahan bulan Oktober. (Data Dishutbun Tanggamus, 2010)

3. Wilayah Kerja dan Aksesibilitas Gapoktan Bakti Makmur.

Wilayah Kerja kelompok tani Bakti Makmur berada pada kawasan Hutan lindung register 30 seluas ± 12.061,38 ha.

Jarak antar wilayah di Gapoktan Bakti Makmur adalah:

- a. Jarak dari wilayah kerja ke pusat pemerintahan kecamatan adalah 5 km.

b. Jarak dari wilayah kerja ke ibukota kabupaten adalah 5 km.

c. Jarak dari wilayah kerja ke ibukota provinsi adalah 100 km.

Jalan menuju Gapoktan Bakti Makmur dapat ditempuh melalui kendaraan roda dua dan roda empat dari Kota Agung Pusat menuju Pekon Teratas sampai ke sekretariat Gapoktan Bakti Makmur. Agar dapat masuk ke wilayah kerja, dapat ditempuh dengan jalan kaki atau dengan kendaraan roda dua dari sekretariat Gapoktan. (Data Dishutbun Tanggamus, 2010)

4. Sosial Ekonomi Masyarakat

a. Kelembagaan

Kelembagaan di wilayah kerja terdiri dari lembaga formal dan non formal. Lembaga formal antara lain SD dan Pondok Pesantren. Sedangkan lembaga non formal antara lain Remaja Masjid (RISMA), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), pengajian muslimat dan kelompok tani pertanian yang bergerak membina petani sawah dan hortikultura, lembaga yang bergerak dibidang pembinaan kehutanan dan perkebunan adalah Gapoktan Bakti Makmur.

b. Kelompok Tani Hutan

Gapoktan Bakti Makmur terdiri dari 11 (sebelas) kelompok tani, yang mengawasi sebesar 20-60 ha per kelompok, yang jumlah anggotanya 25-50 orang per kelompok. Anggota kelompok tani Bakti Makmur sebagian besar awalnya bermata pencaharian sebagai petani, sehingga dapat mendukung untuk dilakukan program

HKm sebagai salah satu upaya untuk merehabilitasi hutan di register 30 Kabupaten Tanggamus serta mencukupi kebutuhan hidup masyarakat sekitar.

1) Pengelolaan Areal HKM.

Pengelolaan Areal HKm dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan usaha menanam tanaman berumur panjang yang dapat menutup tanah dan melindungi areal hutan dari bencana. Pengelolaan areal HKm merupakan modal besar dalam mensukseskan upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang ada di wilayah kelola Gapoktan Bakti Makmur, Pekon Teratas. Pengelolaan HKm yang dilakukan oleh gapoktan Bakti Makmur antara lain penanaman jenis tanaman campuran, tata waktu rencana kegiatan penanaman, rencana pengaturan hasil tanaman, pemasaran dan pembiayaan produksi hasil hutan dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Penanaman jenis tanaman campuran

Jenis tanaman yang diprogramkan pada kegiatan HKm terdiri dari tanaman pokok dan tanaman sela. Untuk tanaman pokok digunakan sebagai tanaman tegakan berupa jenis tanaman kayu-kayuan sebanyak 70% dari lahan yang dikelola seperti tanaman Suren, Mahoni, Sengon, Cempaka, dan Jati. Sedangkan tanaman sela sebanyak 30%, berupa tanaman Kakao, Kopi dan *Multy Purpose Trees Species* (MPTs), yaitu tanaman yang memiliki banyak manfaat, seperti Durian, Petai, Alpukat, dan tanaman untuk konsumsi lainnya (Farid, 2010).

b. Tata waktu kegiatan pembibitan dan penanaman

Kegiatan penanaman tanaman pokok kayu-kayuan dan tanaman sela yang sudah berjalan dilaksanakan dalam dua tahapan, meliputi pembibitan pada bulan November 2006 dan penanaman yang dimulai Maret 2007-2008. Sedangkan untuk kegiatan penanaman tanaman sela sifatnya bertahap, mengingat tanaman kopi yang sudah tertanam. Tahun 2009-2010 belum diadakan kegiatan penanaman karena sedang dalam proses pembahasan untuk membuat bedeng semai yang akan dibarengkan dengan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang dicanangkan dari Kementerian Kehutanan yang masing-masing kelompok tani mendapatkan bantuan sebesar Rp. 50.000.000 untuk pembibitan dan penanaman tanaman di areal HKM.

c. Rencana pengaturan hasil produksi.

Produksi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan output dalam bentuk barang maupun jasa. Selain itu produksi dalam arti yang luas diidentifikasi sebagai setiap tindakan yang ditujukan untuk menciptakan dan menambah manfaat atau nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Produksi dapat terwujud karena produsen menyertakan sejumlah produk, seperti tanaman kopi dan kakao, oleh karena itu produksi yang dihasilkan, merupakan produk yang langsung dapat diolah atau langsung dijual. Hasil produksi yang dihasilkan antara lain kopi, kakao, buah-buahan (Durian, Alpukat, Jengkol, Petai) yang merupakan hasil dari pemanfaatan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan petani di sekitar hutan.

Hasil yang diperoleh akan dibeli oleh koperasi yang saat ini masih dipegang oleh Bendahara Gapoktan sesuai harga dasar yang ditentukan bersama sesuai harga pasar kemudian Bendahara Gapoktan akan menyalurkannya ke penyalur di pasar.

d. Pemasaran produksi hasil hutan.

Pengertian pemasaran menurut American Marketing Assosiation (AMA) adalah kegiatan yang meliputi pelaksanaan usaha niaga yang diarahkan pada arus aliran barang dan jasa dari produsen dan konsumen. Fungsi utama kegiatan pemasaran dilakukan untuk yaitu:

1. Untuk memberikan informasi tentang produk yang dijual perusahaan.
2. Untuk mempengaruhi keputusan membeli konsumen.
3. Untuk menciptakan nilai ekonomis suatu barang.

Strategi pemasaran yang paling menonjol untuk dilaksanakan adalah dengan menyesuaikan produksi dengan permintaan pasar. Hal ini penting untuk merencanakan produksi agar tidak terjadi kelebihan. Tentu saja tujuan utamanya adalah menjaga harga jual produk agar tetap stabil. Di lokasi penelitian para petani menampung hasil hutan (sebagai pabrik). Di tempat penampung, yaitu rumah bendahara Gapoktan, bendahara akan melakukan penyaluran hasil hutan ke pembeli selanjutnya yaitu pengumpul yang di datang di sekretariat. Pembeli akan memasarkan hasil produksi berupa kopi dan kakao melalui koperasi atau pedagang besar yang beraada di Pasar

Gisting, Pasar Tanjung Karang, Pasar Teluk. Sementara pihak koperasi atau pedagang besar akan bekerja sama dengan badan-badan usaha, baik badan usaha pemerintah maupun swasta agar barang dapat diolah atau dalam keadaan utuh yang disalurkan kembali ke pengecer atau ke pembeli selanjutnya. Para pengecer disalurkan kepada konsumen akhir. Dengan adanya proses pemasaran tersebut maka akan terjaga kualitas produksi atau kestabilan harga di pasar.

e. Pembiayaan kegiatan produksi.

Biaya yang keluar merupakan swadaya kelompok tani Bakti Makmur, mulai dari penanaman sampai pemeliharaan. Diperkirakan biaya yang akan dikeluarkan para anggota sebanyak Rp.3.750.000,- – Rp.6.000.000,- / ha. Rincian biaya tersebut dipergunakan untuk kegiatan penanaman sebanyak Rp.1.500.000,- , pemeliharaan meliputi : pengadaan pupuk kandang dan pupuk buatan sebanyak Rp. 750.000,- , pengendalian hama penyakit sebanyak Rp.600.000,- , pengolahan hasil dan pemasaran sebanyak Rp. 1.000.000,-. Dalam pengurusan ijin HKm biaya yang dikeluarkan masyarakat sebanyak Rp. 350.000,-. Jadi total yang dikeluarkan oleh masyarakat sebesar Rp. 4.200.000,-.

2) Kegiatan Konservasi Tanah dan Air.

Dalam upaya pencegahan dan pengendalian erosi, kelompok tani memperhatikan beberapa faktor antara lain iklim, tanah, topografi, vegetasi penutupan tanah dan kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan dan pengendalian erosi masyarakat menggunakan beberapa cara, meliputi cara penutupan lahan dengan penanaman dan cara pengolahan tanah.

a. Cara penutupan lahan dengan penanaman.

Dalam usaha konservasi tanah dan air, tanaman penutup sangat penting karena tanaman penutup tanah berfungsi untuk mencegah dan mengendalikan erosi, selain itu juga dapat berfungsi memperbaiki struktur tanah, menambah bahan organik tanah, mencegah proses pencucian unsur hara, mengurangi fluktuasi temperatur tanah. Usaha pengawetan tanah dengan cara ini disebut juga pengendalian erosi secara biologis (*biological ecology control*).

Beberapa cara penutupan lahan secara biologis antara lain:

1. Penghijauan dengan menanam tahunan.
2. Pelaksanaan *strip cropping* atau penanaman mengikuti kontur.
3. Memelihara tanaman rerumputan atau tanaman leguminosa.
4. Menutup tanaman dengan mulsa, baik dari sisa-sisa tanaman ataupun dari bahan yang lain.

Di Areal HKM yang banyak dilakukan oleh masyarakat kelompok tani, yaitu dengan cara dengan cara penanaman yang mengikuti kontur lahan serta memelihara rerumputan atau perdu agar tetap terjaga kesuburan tanah serta menghindari pencucian langsung oleh air hujan.

b. Cara Pengolahan Tanah

Pengendalian dengan cara pengolahan tanah merupakan usaha-usaha pengawetan tanah untuk mengurangi banyaknya tanah yang hilang di daerah lahan pertanian dengan cara mekanisme tertentu. Cara-cara tersebut meliputi:

1. Pembuatan sengkedan atau tarasering pada tanah-tanah miring
2. Pembuatan jalur-jalur aliran *watwer ways* pada tempat-tempat tertentu
3. Pembuatan selokan pada tempat-tempat tertentu
4. Mengadakan pengolahan tanah yang tepat dengan mengikuti kontur tanah

Kelompok tani Bakti Makmur sering menggunakan cara pembuatan jalur aliran air di pinggir-pinggir lahan atau ditempat-tempat yang memiliki kemiringan tinggi serta membuat selokan-selokan di pinggir-pinggir lahan garapan untuk menghindari adanya aliran air yang langsung mengalir dari lahan ke sungai-sungai. Sehingga dengan cara tersebut

diharapkan kesuburan tanah dan kelembapan tanah tetap terjaga walaupun musim kering telah tiba.

c). Organisasi Pelaksana HKm

Kelompok masyarakat sekitar hutan yang tergabung dalam wadah kelompok tani Bakti Makmur merupakan bentuk dari perkumpulan yang mempunyai peran-peran aktif dalam pembinaan dan pengendalian hutan.

Dahulu masyarakat yang mengelola kawasan hutan lindung di register 30 merupakan masyarakat perambah yang masuk mulai dari tahun 1982 dengan menebang secara tradisional yang semulanya hanya beberapa orang kemudian menjadi banyak karena tindakan dari pemerintah sangat lambat sehingga semakin mengundang masyarakat pendatang semakin banyak. Pada tahun 1984-1987 pemerintah pernah melakukan penanganan dengan memusnahkan gubuk-gubuk dan areal yang dibuka oleh para perambah. Pada saat itu masyarakat sudah tidak ada yang berada di dalam kawasan, akan tetapi pada tahun 1994 masyarakat mulai berdatangan dengan membuka kembali lahan yang pernah ditinggalkan karena pengusiran dari pemerintah.

Dengan adanya kelompok tani hutan masyarakat yang berada di dalam kawasan dapat dibina dan diarahkan untuk bersama-sama menghutankan kembali wilayah yang dahulunya rusak menjadi hijau kembali. Adapun kelompok-kelompok tani yang berjumlah 11 (sebelas) kelompok tersebut bergabung menjadi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bakti Makmur yang berdiri tahun 2008 dengan struktur organisasi terdiri dari Pelindung, Penasehat, Ketua Sekretaris, Bendahara dan seksi-

seksi yang kesemuanya memiliki fungsi dan tugas yang berbeda (struktur organisasi terlampir). Sebelas kelompok tani Bakti Makmur memiliki visi dan misi serta tujuan yang sama dalam membina dan mengatur masyarakat hutan antara lain memberdayakan kelembagaan masyarakat penggarap kawasan, meningkatkan ekonomi masyarakat disekitar hutan, menyimpan cadangan makanan, aktif dalam melestarikan dan menjaga fungsi hutan secara berkesinambungan.

Susunan kepengurusan Gapoktan terdiri dari, Wakil Ketua, Sekretaris, Bedahara, Koordinator, Ketua Kelompok Tani yang terdiri dari kelompok tani Bakti Makmur 1-11 dan bidang-bidang. Bidang-bidang tersebut yaitu bidang kerohanian, ekonomi, penyuluhan, penelitian dan pengembangan, Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA), sosial dan budaya, Polisi Masyarakat untuk Perlindungan Hutan (Pamlinhut).

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang telah didapat pada saat penelitian berlangsung. Kemudian hasil temuan-temuan di lapangan yang berhasil di peroleh dari hasil penelitian akan disesuaikan dengan rumusan masalah dan fokus hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis tentang peran lembaga Gapoktan Bakti Makmur sebagai pengelola HKm yang dilakukan di Pekon Teratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan teori Sanim (2006) yang mengatakan bahwa dalam menganalisis kelembagaan secara deskriptif diperlukan analisis situasi (*situation*), struktur (*structure*), perilaku (*behavior*) dan kinerja (*performance*) dan dihasilkan data sebagai berikut :

A. Situasi (*Situation*)

Situasi dalam hal ini adalah menganalisis karakteristik yang melekat pada sumber daya untuk menyajikan data dan informasi yang sesuai dengan kondisi nyata di lokasi penelitian. Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumberdaya manusia yang terlibat dalam melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan yaitu kelompok tani penggarap dan sumberdaya hutan yang dikelola. Kemampuan lembaga dalam mengelola organisasi kelompok tani HKm memiliki beberapa poin penilaian

kemampuan yang telah dipaparkan kondisi yang ada dilokasi penelitian dalam hasil penelitian diatas. Menurut peneliti ada beberapa poin penting dalam menilai keberhasilan Gapoktan, yaitu

1. Program Kerja.

Program kerja disusun dengan melibatkan berbagai unsur yang terlibat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan yang tentunya didasarkan pada kondisi dan potensi hutan dan karakteristik masyarakat setempat. Program kerja disusun dalam upaya untuk mengelola secara menyeluruh setiap tahapan kegiatan pengelolaan hutan. Keterlibatan berbagai unsur terkait dalam penyusunan program kerja disampaikan Bapak Suman Effendy selaku Ketua Gapoktan Bakti Makmur ;

“Proses penyusunan program kerja dilakukan bersama-sama antara gabungan kelompok tani dengan masyarakat sekitar hutan. Pada saat itu beberapa program kerja banyak ditawarkan oleh pengurus akan tetapi harus juga disesuaikan dengan kepentingan masyarakat sekitar. Sehingga diharapkan kepentingan kedua belah pihak dapat terwakili. Program kerja yang disepakati meliputi kegiatan pelestarian fungsi dan manfaat hutan mulai dari perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemanenan” (hasil wawancara, 20 April 2011)

Lembaga Gapoktan Bakti Makmur sudah memiliki program kerja tahunan dan lima tahunan, program tersebut berjalan dengan lancar walaupun masih belum dapat berjalan dengan maksimal, salah satu alasannya yaitu karena masih ada beberapa anggota Gapoktan menganggap bahwa program kerja adalah tugas pengurus. Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa informan, antara lain Wakil Ketua Gapoktan Bakti Makmur, Bapak Paijan, yang menyatakan bahwa ;

“Program kerja memiliki program kerja tahunan dan lima tahunan yang telah direncanakan yang melibatkan pihak luar seperti Dishutbun, LSM untuk membantu kelancaran dari penyusunan program kerja. Program kerja Gapoktan Bakti Makmur juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota Gapoktan, hal ini mencerminkan bahwa program kerja memiliki manfaat untuk masyarakat. Saat ini program kerja yang sedang dan akan berjalan yaitu pembuatan persemaian bibit tanaman yang akan ditanam di areal HKm yaitu program Kebun Bibit Rakyat (KBR). Jenis tanaman dalam program KBR tersebut antara lain MPTs (*Multy Purpose Trees Species*), tanaman kayu-kayuan, Kopi, Kakao. “ (hasil wawancara, 20 April 2011)

Hal lain juga diungkapkan oleh Bendahara Gapoktan, Bapak Muhajir yang menyatakan bahwa:

“ Biarpun kita punya program kerja tapi kita kadang suka dapat masalah. Misalnya dalam penyelenggaraan KBR ini, masih kurangnya koordinasi antara kelompok tani dengan Dishutbun Tanggamus, kelompok kurang dilibatkan secara langsung oleh pemerintah dalam pelaksanaan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, tempat KBR tidak dilokasi kelompok tani HKm melainkan di tempat lain yang jauh dari lokasi areal HKm, pengelolaan keuangan juga tidak langsung oleh kelompok melainkan oleh Dishutbun. “ (hasil wawancara, 19 April 2011)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa program kerja Gapoktan memiliki program kerja tahunan dan lima tahunan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota Gapoktan, hal ini mencerminkan bahwa program kerja memiliki manfaat untuk masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya penyelenggaraan KBR masih kurangnya koordinasi antara kelompok tani dengan Dishutbun Tanggamus, kelompok kurang dilibatkan secara langsung oleh pemerintah dalam pelaksanaan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, tempat KBR tidak dilokasi kelompok tani HKm melainkan di tempat lain yang jauh dari lokasi areal HKm, pengelolaan keuangan tidak langsung oleh kelompok melainkan oleh Dishutbun.

2. Partisipasi Pengurus dan Anggota Gapoktan

Salah satu peranan Gapoktan Bakti Makmur adalah meningkatkan peranserta (partisipasi) pengurus Gapoktan dan anggota Gapoktan serta pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya hutan. Partisipasi pengurus Gapoktan dan penggarap dapat diwujudkan dalam setiap kegiatan (tahap perencanaan, pembiayaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan). Bentuk partisipasinya dapat diwujudkan dengan kehadiran dalam setiap kegiatan, ide, gagasan, usulan pendapat dalam perencanaan program, kesediaan menjadi pengurus, dan partisipasi secara tidak langsung yang dilakukan oleh penggarap dalam mengolah lahan sekitar hutan dan ikut menjaga keamanan hutan.

a. Peranserta Pengurus Gabungan Kelompok Tani Bakti Makmur

Berdasarkan kenyataan di lapangan dapat dijelaskan peranserta pengurus Gabungan Kelompok tani Bakti Makmur diwujudkan hanya baru sebatas pada tahapan perencanaan (dengan menghadiri dan memberikan pendapat pada pertemuan perumusan rencana program kerja), pengorganisasian (dengan kesediaan untuk menjadi pengurus Gapoktan). Namun peranserta (partisipasi) mereka saat ini perlu adanya dorongan agar lebih aktif dalam kepengurusan Gapoktan.

Kondisi di atas didasarkan pernyataan informan Suman Effendy selaku ketua Gabungan Kelompok Tani Bakti Makmur yang mengatakan bahwa:

“Pada saat sosialisasi memang terlihat respon dan harapan yang besar dari masyarakat pada program HKM. Kesediaan beberapa orang untuk menjadi pengurus juga sangat dihargai. Apalagi pada saat penyusunan program kerja

bersama. Terlihat semangat yang besar dari beberapa pengurus dalam mengajukan usulan program kerja. Namun pada pelaksanaannya, terkadang setelah ada kendala/ hambatan semangat mereka sepertinya mulai mengendur dan menjadikan pengurus kurang aktif”. (hasil wawancara, 20 April 2011)

b. Peranserta Anggota (penggarap)

Berdasarkan kenyataan di lapangan menunjukkan tingkat partisipasi penggarap yang sudah menggarap sebelum ataupun sesudah HKm terbentuk telah dilakukan dengan baik walaupun masih terbatas. Partisipasi penggarap tersebut diwujudkan secara tidak langsung dalam mengelola dan mengolah lahan kosong disekitar dengan tanaman palawija. Disamping itu, mereka juga ikut merawat dan menjaga keamanan tanaman tegakkan kayu hutan. Partisipasi ini diwujudkan secara sadar dan sukarela karena mereka juga merasa mendapat manfaat dari hutan di sekitarnya.

Kondisi di atas didasarkan pernyataan informan, Asroni Arka koordinator dalam kepengurusan Gabungan Kelompok Tani Bakti Makmur yang menyatakan bahwa :

“Dalam program HKm Pengurus Gapoktan mengharapkan kepada penggarap agar ikut menjaga dan merawat hutan. Karena penggarap telah mendapat manfaat dari hutan di sekitarnya maka mereka secara bertanggung jawab dan sukarela ikut menjaga dan merawat hutan. Saya berharap agar hal ini bisa terus berlangsung karena ini sangat bermanfaat baik bagi penggarap karena mendapat penghasilan dari tanaman mereka.” (hasil wawancara, 22 April 2011)

Pernyataan di atas juga didukung oleh pernyataan informan Suman Effendy selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Bakti Makmur yang menyatakan :

“Justru saat ini penggarap yang harus lebih banyak berperan dalam memelihara dan menjaga kelestarian hutan. Hal itu mereka lakukan karena mereka juga melakukan aktifitas mengolah lahan sekitar hutan dengan tanaman yang menghasilkan. Dan mudah-mudahan kondisi ini bisa tetap berlangsung karena memberikan keuntungan bersama” (hasil wawancara, 20 April 2011)

Berdasarkan beberapa hal tersebut maka peneliti menilai bahwa Gapoktan Bakti Makmur memiliki kelemahan dalam musyawarah penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sesuai program kerja, yaitu kurang antusiasnya pengurus dan para anggota kelompok untuk menghadiri pertemuan-pertemuan rutin, sehingga informasi yang berkaitan dengan program HKm tidak merata. Kendala yang dihadapi masyarakat dalam pertemuan-pertemuan adalah persoalan membagi waktu dan mengelola waktu sehingga masyarakat sering kesulitan membagi waktu antara tugas rumah tangga dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah. Dalam hal pelaksanaan program kerja, kurangnya sosialisasi program kerja kepada masyarakat Gapoktan juga menjadi masalah yang dialami Gapoktan Bakti Makmur.

3. Kemampuan Lembaga

Hasil penelitian tentang kemampuan lembaga Gapoktan dapat dikatakan mampu sebagai pengelola hutan kemasyarakatan karena lembaga Gapoktan Bakti Makmur memiliki bentuk lembaga yang jelas (ada nama kelompok, alamat sekretariat, terdaftar di pekon) dan sudah terdaftar di pekon Teratas sebagai pengelola Hutan Kemasyarakatan. Nama kelompok tani di Pekon Teratas adalah Gapoktan Bakti Makmur yang merupakan gabungan dari kelompok-kelompok tani sebanyak 11 (sebelas) kelompok tani Bakti Makmur. Perkumpulan tersebut menjadi sebuah wadah untuk para petani hutan di Pekon Teratas dengan sekretariat di masing-masing ketua kelompok tani Bakti Makmur. Sekretariat Gapoktan saat ini di rumah bapak Kajir (Bendahara Gapoktan) dengan alamat Pekon Teratas Jalan Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Indonesia 35384. Selain itu

lembaga Gapoktan sudah terarah walaupun lembaga tersebut masih dalam bentuk perkumpulan.

Hal Senada diakui oleh Wakil Ketua Gapoktan Bakti Makmur yaitu Bpk. Paijan yang mengatakan bahwa:

“ secara kelembagaan Gapoktan Bakti Makmur sudah memiliki bentuk lembaga yang jelas, setiap kelompok Gapoktan sudah memiliki nama kelompok, alamat sekretariat dan terdaftar di dalam Pekon. (Hasil wawancara, 21 April 2011).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara kelembagaan Gapoktan Bakti Makmur tergolong Gapoktan yang memiliki kelembagaan yang kuat. Hal tersebut dilihat dari latar belakang kelembagaan yang sudah memiliki bentuk lembaga yang jelas.

4. Struktur Organisasi Kelompok

Berkaitan dengan struktur organisasi Ketua Gapoktan Bakti Makmur Suman Effendi

Mengatakan bahwa :

“Dalam struktur organisasi kelompok pengurus memahami perangkat-perangkat organisasi baik ketua, sekretaris, bendahara, maupun anggota. Ada aturan main kelompok dan/atau AD/ART secara tertulis yang mengatur tujuan berdirinya kelompok, administrasi keorganisasian kelompok, serta hubungan antara kelompok dengan para pihak lainnya, serta ada aturan lainnya yang mendukung pelaksanaan HKM dan diketahui dinas, anggota kelompoknya, areal yang dikelola kelompok, administrasi kelompok, program kerja kelompok dan mampu berkomunikasi dengan pengurus yang lainnya secara mandiri. “ (Hasil wawancara , 20 April 2011).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Gapoktan Bakti Makmur telah mampu secara mandiri dalam menjalankan tugas dan perannya karena masing-masing dari mereka telah mampu memahami tujuan dari berdiri dan

adanya kelompok Gapoktan. Karena pemahaman yang mereka miliki mereka mampu secara mandiri dalam menjalankan tugas dan perannya dalam melakukan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut kemudian peneliti melakukan observasi di lokasi penelitian dan memperoleh hasil bahwa Gapoktan Bakti Makmur memang mampu secara mandiri dalam menjalankan tugas dan peranannya. Kelompok mampu menjalin komunikasi dengan dinas kehutanan secara baik dalam pelaksanaan program-program Hutan Kemasyarakatan.

Pengurus masih perlu diberi masukan didalam melakukan kinerjanya karena kendala yang dihadapi dalam menjalankan lembaga Gapoktan Bakti Makmur yaitu kurangnya informasi perkembangan dari luar serta kurang intensifnya pendamping di dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok tani. Kemampuan tersebut dapat dicapai dengan banyak hal seperti musyawarah mufakat secara rutin yang rata-rata diadakan pertemuan 1 (satu) bulan 1 (satu) kali untuk membicarakan permasalahan, solusi dan informasi yang berkembang dan harus di tanggapi oleh kelompok tani.

5. Keanggotaan Kelompok

Anggota masyarakat yang menjadi anggota rata-rata bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan. Hal tersebut ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bertempat tinggal di Pekon Teratas. Namun ada sebagian yang memiliki rumah di luar

dan di sekitar kawasan hutan. Dalam mengelolapun mereka tidak menetap di dalam areal kelola, biasanya hanya musim-musim menjelang panen. Didalam mengelola lahan jenis kelamin baik pria maupun wanita bukanlah pembeda di dalam mengelola areal hutan kemasyarakatan, pada saat wawancara hampir yang ditemui adalah para kaum pria.

6. Administrasi Keorganisasian Kelompok

Tata administrasi keorganisasian kelompok memiliki data pokok organisasi yang lengkap, sehingga mereka mengetahui anggota yang tergabung dalam kelompoknya masing-masing. Dalam hal dokumentasi keuangan tidak semua anggota tahu, banyaknya anggota yang tidak tahu dengan alasan bahwa bendahara yang lebih mengetahui dokumen keuangan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok sebagian didokumentasikan dengan baik yang berupa laporan dalam setiap pertemuan. Dalam hal tata administrasi kelompok, tidak semua anggota mengetahui hal tersebut terjadi karena anggota belum banyak yang mengetahui tata kelola organisasi kelompok secara menyeluruh.

B.Struktur (*structure*)

Struktur menjelaskan kepemilikan terhadap sumberdaya dengan mengetahui unsur-unsur kelembagaan antara lain batas yuridiksi, hak kepemilikan, aturan representasi (Sanim, dkk. 2006). Di lokasi penelitian peneliti memperoleh hasil mengenai areal

kelola kelompok dari Gapoktan Bakti Makmur. Areal kelola masing-masing kelompok masih dalam satu hamparan. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan ketika akan pembentukan kelompok tani HKm, dengan maksud agar mudah dalam pendataan dan koordinasi antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Gapoktan Bakti Makmur yang mengatakan bahwa;

“Areal kelola kelompok telah dibuat sesuai dengan kesepakatan masing-masing kelompok tani yang dibuat saat mengajukan ijin HKm, dengan areal kelola yang telah di legal kan pemerintah, anggota gapoktan menjadi nyaman dalam mengelola lahannya, tidak ada konflik perebutan lahan oleh anggota lain atau perambah, karena masing-masing telah diatur dan ada dasar hukum yang jelas.” (hasil wawancara, 20 April 2011)

Areal kelola kelompok adalah areal yang telah dikukuhkan atau dicadangkan sebagai kawasan HKm oleh pemerintah. Respon masyarakat menyambut program HKm ini dengan sangat antusias karena areal yang mereka kelola mendapatkan ijin resmi oleh pemerintah, sehingga tidak ada rasa was-was lagi untuk mengelola kawasan hutan register 30.

Setiap kelompok rata-rata memiliki blok perlindungan dan blok budidaya, alasan petani yang lahannya tidak ada blok perlindungan yaitu belum dapat mencukupi kebutuhan hidup sehingga areal mereka ditanami tanaman budidaya saja. Kelompok telah mempunyai peta areal kelompok yang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Tanggamus dan Lembaga Swada Masyarakat (LSM). Pembuatan peta dilaksanakan karena persyaratan untuk menjadi pengelola HKm harus memiliki peta areal kerja. Tahun 2010 sedang akan dilakukan pengukuran oleh Dishutbun Kabupaten Tanggamus untuk pembuatan peta

disetiap anggota kelompok tani dengan tujuan memperjelas areal yang menjadi hak kelola para petani. Karena selama ini peta yang digunakan yaitu peta areal kerja kelompok bukan peta areal kerja per anggota kelompok ditambah dengan status lahan yang mereka kelola adalah kawasan hutan lindung.

Sebelum izin HKm diterbitkan, terjadi proses ganti rugi antar petani yang ingin meninggalkan areal lahan yang mereka kelola kepada para petani yang ingin mengelola lahan yang dikelola. Setelah izin HKm diterbitkan sampai saat ini tidak ada pemindahtanganan areal kelola antar anggota kelompok. Justru saat ini banyak mengajak sanak saudaranya untuk turut membantu mengelola lahan garapannya dengan harapan dapat meneruskan areal yang dikelola nanti dengan mempertimbangkan izin HKm yang sangat lama yaitu selama 35 tahun.

C. Perilaku (*behaviour*)

Perilaku dalam hal ini meninjau mengenai perilaku dari masing-masing pemangku kepentingan-kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat dan bagaimana kepentingannya terhadap suatu sumber daya. Di wilayah kerja Gapoktan Bati Makmur ada beberapa lembaga yang memiliki kepentingan terhadap sumberdaya yang ada. Adanya jaringan kerjasama dengan pihak-pihak lain sangat bermanfaat dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan di register 30 Pekon teratas Kecamatan Kota Agung. Kerjasama yang bisa dilakukan antara lain dengan pihak-pihak pemerintah daerah dan pihak ketiga yang akan memberikan bantuan modalnya

di Gapoktan Bakti Makmur. Dalam kenyataan kondisi di lapangan menunjukkan sudah terbinanya kerjasama yang intensif yang dilakukan Gapoktan Bakti Makmur dengan pihak pemerintah daerah atau dinas terkait, yaitu dilakukan dengan dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus, dengan memberikan pembinaan teknis berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hutan. Dengan mencermati sejumlah kebijakan yang berkait dalam rancangan kegiatan yang bertujuan mengupayakan penyelamatan hutan, kiranya dapat ditelaah sejauh mana efektivitasnya. Pengelolaan hutan kemasyarakatan yang implementasinya telah dilaksanakan memberikan harapan besar terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar hutan. Namun berdasarkan evaluasi program yang peneliti lakukan masih dijumpai adanya kelemahan-kelemahannya dibidang struktur akses dan kontrol sumberdaya hutan,

Hal ini diperkuat dengan pendapat dari koordinator Gapoktan Bakti Makmur, Bapak Asroni Arka yang mengatakan bahwa ;

“ ada beberapa masalah yang mengakibatkan jaringan kerja sama terutama antar pengurus dan anggota Gapoktan belum berjalan dengan baik, di antaranya yaitu masih terbatasnya kualitas pengurus dan anggota baik dalam hal organisasi maupun teknis di lapangan, rendahnya pengawasan di lapangan, dan tidak adanya ketegasan sanksi bagi pengurus Gapoktan yang lalai dalam kewajiban, belum adanya pemerataan ekonomi dalam pengelolaan petak hutan bagi masyarakat lokal, dan belum mengarah pada penanganan kondisi hutan secara umum yang belum optimal.” (hasil wawancara, 23 April 2011)

Kenyataan diatas mengindikasikan bahwa struktur akses dan kontrol sumberdaya alam hutan belum memberikan arah akses kepada penggarap di sekitar hutan register 30 Pekon Teratas Kecamatan Kota Agung sesuai dengan peran dan fungsinya untuk mengelola hutan secara partisipatif, atas kemitraan, keterpaduan,

ketersediaan, dan sistem *sharing*. Pengelolaan hutan kemasyarakatan dalam proses pengembangan masyarakat untuk mewujudkan kelembagaan Gabungan Kelompok Tani Bakti Makmur sebagai wadah perjuangan dijadikan instrumen membangun kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab bersama serta menggali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan kemasyarakatan, namun sebaliknya pesan-pesan moral terlupakan oleh kepentingan-kepentingan pribadi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diusung oleh Gapoktan Bakti Makmur sehingga upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dari golongan bawah dapat terabaikan. Penerapan kebijakan dengan model pendekatan kesejahteraan, baik berupa kerjasama terpadu antara pemerintah kabupaten dengan Gabungan Kelompok Tani Bakti Makmur dengan paradigma baru hanya dapat berjalan efektif manakala kondisi pemerintahan negara dalam keadaan kuat dan stabil tanpa gejolak politik. Manakala keadaan politik negara dan pemerintahan labil, efektivitas model pendekatan pengelolaan hutan kemasyarakatan yang masing-masing bergerak dalam skala luas dapat sirna seketika.

4. Kinerja (*performance*)

Kinerja dalam hal ini yaitu menggambarkan kondisi pengelolaan terhadap sumberdaya hutan apakah sudah cukup baik atau belum (Sanim, dkk. 2006). Anggota Gapoktan di sekitar wilayah hutan ini biasanya berada dalam kondisi miskin dan melakukan kegiatan sehari-hari yang berinteraksi dengan sumber daya hutan untuk mendukung kehidupannya. Aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan biasanya adalah mencari kayu

bakar dan mengumpulkan daun-daun jati untuk dijual. Secara umum kondisi rendahnya taraf hidup penggarap (anggota gapoktan) di pekon teratas disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan penggarap.

Rendahnya tingkat pendidikan tersebut menyebabkan mereka tidak dapat bersaing dalam lapangan kerja yang tersedia. Buruh tani selama ini memiliki masalah dengan lahan yang mereka kelola dan juga proses mulai dari pembibitan sampai penjualan hasil panen. Kinerja Gapoktan juga cukup dipengaruhi oleh banyaknya pola pikir yang disebabkan perbedaan prinsip dari berbagai suku yang mendiami kawasan hutan tersebut. Melalui program Hutan Kemasyarakatan diberikan kesempatan penggarap di sekitar hutan untuk mengolah lahan secara legal, ada kesamaan yang mengakibatkan tidak adanya konflik mengenai perbedaan pola pikir antar kelompok dan banyak mendapat bantuan dari pemerintah dalam hal ini dishutbun kabupaten tanggamus, baik itu dalam hal penyuluhan maupun bantuan bibit tanaman yang disampaikan langsung ke tiap gapoktan. Peneliti dalam hal ini melihat penilaian kinerja Gapoktan Bakti Makmur dalam beberapa hal, yaitu;

1. Demokrasi

Prinsip demokrasi sudah cukup diaplikasikan dalam pelaksanaan kegiatan program kerja Gapoktan, setelah melihat proses dalam pengambilan keputusan dalam rapat yang dilakukan pengurus dan anggota Gapoktan, keputusan diserahkan sepenuhnya pada ketua Gapoktan berdasarkan pertimbangan dan persetujuan yang disepakati.

Hal ini dikatakan oleh wakil ketua Gapoktan yang mengatakan bahwa ;

“sistem pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Gapoktan Bakti Makmur tidak didasarkan oleh keputusan pengurus saja, melainkan dengan mempertimbangkan masukan pendapat dari anggota gapoktan selalu dilibatkan dalam musyawarah” (hasil wawancara, 20 April 2011)

2. Partisipasi

Prinsip partisipasi telah dijalankan sesuai aturan pelaksanaan kegiatan Gapoktan, anggota Gapoktan dilibatkan secara aktif untuk menjalankan semua program kerja, baik yang direncanakan oleh intern kelompok ataupun dari Dishutbun. Namun ada juga sebagian masyarakat yang berpartisipasi baru sebatas pengelolaan lahan hutan, sedangkan partisipasi mereka terhadap ketaatan terhadap norma/aturan yang sudah ditetapkan dalam AD/ART Gapoktan sangat rendah sekali, hal tersebut terlihat dari keengganan mereka untuk mendaftarkan diri sebagai anggota Gapoktan yang dibuktikan dengan kepemilikan buku anggota dan tidak maunya memenuhi kewajiban menyetorkan iuran bulanan ke Gapoktan.

Pernyataan ini disampaikan oleh sekretaris Gapoktan yang berkata bahwa;

“partisipasi yang dilakukan sudah cukup baik, dalam pengelolaan hutan dan pelaksanaan program kerja lain tentu saja masyarakat harus terlibat, tapi ada juga masyarakat gapoktan yang “bandel”, buat daftar dan bayar iuran saja keberatan, padahal kan buat kepentingan bersama juga.” (hasil wawancara, 22 April 2011)

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam hal transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam hal yang terkait dengan masalah keuangan dan program lain, baik itu berupa bantuan dari pemerintah ataupun dari pihak lain yang bekerja sama dengan Gapoktan selalu dilakukan dengan terbuka,

informasi selalu disampaikan kepada anggota dalam setiap pertemuan (musyawarah) gapoktan,

Bendahara Gapoktan Bakti Makmur mengatakan bahwa ;

“sistem keuangan, pendanaan, ataupun iuran dipegang oleh bendahara dengan persetujuan seluruh pengurus dan perwakilan kelompok, jadi saya memegang amanah yang dikasih ke saya harus dengan sepengetahuan seluruh pengurus dan perwakilan kelompok itu, uang yang saya terima dan saya keluarkan tentu saja diketahui semua pihak terkait, masalah bibit ataupun bantuan lain selalu disosialisasikan, jadi diharapkan tidak ada kecurigaan yang ditimbulkan” (hasil wawancara, 22 April 2011)

Pernyataan itu juga dikuatkan salah satu perwakilan kelompok yang mengatakan bahwa;

“Gapoktan bakti makmur dibentuk dengan adanya persamaan tujuan bersama berarti semua pengambilan keputusan juga harus dibicarakan bersama, prinsip keterbukaan menjadi nomor satu” (hasil wawancara, 24 April 2011)

Kinerja Gapoktan Bakti Makmur juga dapat dilihat dari Dampak Sosial, Ekonomis dan Ekologis dari Program HKM yang ada. Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa poin tentang dampak-dampak yang terjadi selama berlangsungnya HKM;

1. Dampak sosial

Selaku perwakilan dari masyarakat telah mengungkapkan hal positif dari adanya HKM yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat Gapoktan cukup merasakan dampak sosial dengan adanya HKM yaitu tercipta hubungan dialogis dan harmonis antara kelompok dengan pemerintah serta menurunnya sengketa antar anggota dalam pengelolaan hamparan. Jika terjadi permasalahan anggota kelompok lebih cenderung menyelesaikannya dengan cara musyawarah di internal kelompok. Jika internal kelompok tidak dapat menyelesaikannya, maka kelompok meminta pihak kedua baik kepala pekon atau Dinas Kehutanan Tanggamus untuk menyelesaikannya. “ (hasil wawancara, 21 April 2011)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Program HKm berdampak sosial yaitu terlihat dari upaya penyelesaian masalah sengketa lebih bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah. Terwujudnya budaya musyawarah dilungkungan Gapoktan juga berdampak pada turunnya sengketa antara pemerintah dengan masyarakat, dahulu pada tahun 1984-1987 masyarakat diusir dari dalam kawasan hutan lindung sehingga terjadi konflik. Karena fungsi hutan lindung yaitu sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (UU No. 41 tahun 1999). Konflik tersebut mulai mereda pada tahun 1994, sehingga masyarakat mulai mengelola lahan kembali yang pernah di buka pada waktu itu di kawasan hutan lindung register 30 hingga tahun 2008. Pada tahun 2008 masyarakat berinisiatif mengikuti program HKm agar lebih nyaman dan aman untuk mengelola kawasan hutan lindung karena mendapat kepastian dalam mengelola kawasan hutan selama 35 tahun .

Dengan adanya program HKm saat ini masyarakat juga dapat merasakan bahwa perlunya pengelolaan secara bersama-sama antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya agar dapat mengetahui informasi baik masalah dan solusi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan lahan garapan mereka (Setyowati dan Suporaharjo, 2008), sehingga dapat menunjang kemajuan kehidupan para petani hutan yang tergabung dalam Gapoktan Bakti Makmur.

2.Dampak Ekonomis

Dampak ekonomis yang belum banyak dirasakan oleh masyarakat yaitu manfaat kayu dari areal garapan masyarakat. Sehingga masyarakat masih menganggap peraturan pemerintah masih kaku dengan adanya aturan tidak boleh menebang di areal hutan lindung khususnya di register 30. Sampai saat ini di dalam areal kelola, banyak terdapat tanaman tajuk tinggi yang berpotensi untuk dijadikan bahan baku seperti pembuatan rumah dan kusen. Kayu dari areal lahan petani sebenarnya dapat digunakan untuk keperluan pribadi, tetapi petani yang akan menggunakan kayu dihinggapi rasa takut dengan peraturan pemerintah yang tidak memperbolehkan menebang di kawasan hutan lindung.

Hal ini diungkapkan oleh anggota kelompok tani yang mengatakan;

“Dampak ekonomi secara umum cukup terbantu, karena disamping kami mendapat bantuan dalam pembibitan tanaman dan penyuluhan lain, namun di satu sisi, ada peraturan yang menurut kami tidak berpihak dan kurang efektif menurut kami, seperti pemanfaatan kayu pohon tertentu, walaupun pohon sudah roboh, yang dilarang penggunaannya, padahal kan kayu itu bisa dijual atau dibuat perabotan.” (hasil wawancara, 24 April 2011)

Terkait dengan dampak ekonomi, Karjiyono (2011) menyatakan bahwa sektor kehutanan pada umumnya memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil, sehingga alokasi anggaran untuk sektor kehutanan juga relatif kecil. Dampaknya adalah alokasi anggaran untuk sektor kehutanan lebih banyak dibelanjakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan administrasi kantor, hanya sedikit untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang merupakan prasyarat untuk mengimplementasikan kebijakan hukum pemberdayaan masyarakat

3. Dampak Ekologis Masyarakat

Masyarakat mengungkapkan dampak ekologis yang dirasakan dengan adanya HKM yang diwakili oleh beberapa anggota gapoktan yang mengungkapkan bahwa;

“Terkait dampak ekologis dari adanya HKM adalah adanya kesuburan tanah di areal kelola stabil dari tahun-ketahun sehingga dapat dikatakan tidak ada peningkatan maupun penurunan. Kebiasaan para petani yaitu melakukan penanaman di areal kelola, sehingga tanah tetap terjaga kesuburannya didukung dengan curah hujan yang cukup tinggi di areal kelola HKM tersebut.” (Hasil wawancara, 24 April2011)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa adanya kegiatan HKM telah membawa dampak positif bagi kondisi ekologi disekitar HKM. Dampak positif yang dirasakan yaitu adanya tingkat kesuburan tanah di areal kelola. Dengan demikian kegiatan HKM yang dilakukan di Gapoktan Bakti Makmur telah berhasil dilaksanakan dengan baik.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian diatas, maka didalam pembahasan akan dilakukan analisis tentang Peran Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Bakti Makmur Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Register 30 Pekon Teratas Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Tahun 2010:

A. Situasi (*situation*), menganalisis karakteristik yang melekat pada sumberdaya yaitu dalam menyajikan data dan informasi yang sesuai dengan kondisi nyata di lokasi penelitian. Kemampuan lembaga dalam mengelola organisasi kelompok tani HKM memiliki beberapa poin penilaian kemampuan yang telah dipaparkan kondisi yang

ada dilokasi penelitian dalam hasil penelitian diatas. Salah satu poin penting dalam keberhasilan suatu lembaga yaitu penilaian mengenai program kerja. Lembaga Gapoktan Bakti Makmur sudah memiliki program kerja tahunan dan lima tahunan, program tersebut berjalan dengan lancar walaupun masih belum dapat berjalan dengan maksimal, salah satu alasannya yaitu karena masih ada beberapa anggota Gapoktan menganggap bahwa program kerja adalah tugas pengurus. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa program kerja yang telah dibuat masih kurang mendapat masukan dari pihak luar (Dishutbun, LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian) secara maksimal sehingga sedikit informasi yang masuk untuk diolah menjadi sebuah program oleh Gapoktan.

Upaya untuk meminta masukan sudah dilakukan seperti meminta kepada LSM, UPTD Dishutbun Tanggamus untuk membantu didalam memberikan masukan terhadap program kerja dan pelaksanaan kegiatan, karena keterbatasan jaringan seperti kurang berkomunikasi untuk meminta bantuan kepada perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga program kerja belum optimal dijalankan.

Dalam makalah penunjang pembangunan hutan kemasyarakatan pada Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) ke-IV bahwa program lebih dititik beratkan pada upaya peningkatan kapasitas sumberdaya yang ada, maka program-program yang diusulkan dalam strategi pembangunan hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat lebih inovatif.

Dalam hal mencapai tujuan kelompok tani, maka Gapoktan Bakti Makmur seharusnya membaca peluang yang ada di daerah, baik peluang kebijakan dari pemerintah, program-program yang dicanangkan pemerintah sehingga mampu mendukung

pengembangan program kerja kelompok ((Soekanto, Soerjono,1986) menyatakan, bahwa petani harus didorong dengan program-program dan pendekatan yang efektif. Karena tidak ada cara yang lebih efektif dari upaya penguatan kelembagaan ditingkat petani. Semua lembaga dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa harus kuat, terlebih dengan kelembagaan kelompok tani. Karena dengan lembaga kelompok tani tersebut pemerintah dapat lebih mudah memantau dan memberikan bantuan dengan tepat. Selain itu juga diperlukan revitalisasi lembaga agar semakin hidup mulai desa (kelompok tani, gabungan kelompok tani) hingga ketingkat pusat.

Dunia petani bukanlah dunia yang memupuk individualitas, tetapi dunia kolektif dan harus memupuk rasa gotong royong. Dengan adanya kelembagaan kelompok tani atau gabungan kelompok tani, berbagai kebijakan pemerintah akan lebih jelas arahnya dan pertanggung jawabannya (Soekanto, Soerjono,1986). Kelembagaan juga akan mengikat rasa saling memiliki, memahami, menumbuhkan jiwa kekeluargaan antar petani sehingga fungsi, peran, dan program dari lembaga harus ditingkatkan.

Jika peluang tersebut digabungkan dengan karakteristik masyarakat yang hampir secara keseluruhan adalah petani hutan yang memiliki cara tersendiri didalam mengelola areal lahan garapannya, Nugraha dan Murtijo (2005) menyatakan bahwa dengan peluang dan karakteristik masyarakat yang hampir homogenitasnya tinggi maka akan tercipta kearifan lokal dan dinamika kehidupan yang harmonis serta menyatu dengan sumber daya hutan dalam proses pengelolaan lembaga Gapoktan demi kemajuan para petani.

Masyarakat yang tergabung dalam Gapoktan Bakti makmur menggantungkan hidupnya terhadap sumberdaya alam yang ada, sehingga mereka harus berusaha untuk bertahan

hidup walaupun jarak antara tempat tinggal dengan areal kelola sangat jauh. Akan tetapi, masih ada pengurus dan anggota yang tinggal didalam areal hutan itu pun dilakukan mengingat tempat tinggal mereka yang tidak berada diwilayah sekitar hutan, sehingga harus terpaksa tinggal dikawasan untuk beberapa minggu bahkan bulan untuk mengelola areal yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun.

Secara kelembagaan, Gapoktan Bakti Makmur mampu untuk mengelola HKm kedepan. Perlunya peningkatan pemahaman petani agar lembaga lebih berdaya dan mampu dengan dasar bahwa sebagian besar mereka hanya mengenyam pendidikan sampai jenjang Sekolah Dasar (SD). Hal tersebut menyebabkan minimnya pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari luar untuk kemajuan diri mereka sendiri. (Farid, 2010)

Minimnya pengetahuan juga berimplikasi terhadap upaya yang dilakukan untuk mengelola HKm mulai dari persiapan hingga pemasaran hasil hutan. Selain itu tingkat pendidikan juga mempengaruhi pola berfikir untuk menggunakan berbagai potensi alam yang ada di areal kelola baik kayu maupun non kayu untuk mencukupi kebutuhan mereka. Kedepan dibutuhkan upaya dari pemerintah untuk mendorong keberhasilan dari program HKm oleh Gapoktan Bakti Makmur untuk mencapai sesuai dengan azas penyelenggaraan HKm dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan yaitu:

1. Manfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya
2. Musyawarah-mufakat
3. Berkeadilan

B.Struktur (Structure)

Struktur menjelaskan kepemilikan terhadap sumberdaya dengan mengetahui unsur-unsur kelembagaan antara lain batas yuridiksi, hak kepemilikan, aturan representasi (Sanim, dkk. 2006). Pengertian dan pembahasan dari masing-masing unsur kelembagaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Batas yuridiksi (*Jurisdiction Boundary*)**, yaitu batas wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki oleh suatu lembaga. Masyarakat yang tergabung dalam Gapoktan Bakti Makmur sudah berbaur dengan berbagai seperti suku Jawa, Sunda, Sumendo, Lampung, Bengkulu. Mereka hidup rukun karena sejak dari dahulu mereka hidup bersama-sama merasa satu nasib satu sepenanggungan yaitu sebagai petani yang mengandalkan hasil hutan yang mereka kelola. Sehingga wilayah kekuasaan hukum atau norma yang terbangun disana bukanlah dengan cara adat dari salah satu suku seperti jaman dahulu lagi, melainkan dengan aturan yang disepakati secara bersama-sama.

Dengan demikian terjadi hubungan timbal balik antar warga masyarakat dalam upaya bersama-sama mengelola lahan garapan mereka walaupun cara mengelola lahan oleh masing-masing suku juga berbeda. Semenjak program HKm masuk, maka hukum atau norma yang berlaku untuk menjaga kelestarian fungsi hutan yaitu aturan main dan kesepakatan yang dibuat bersama-sama dan tertuang dalam hak dan kewajiban anggota Gapoktan Bakti Makmur serta diketahui oleh kepala pekon. Batas otoritas lembaga Gapoktan yaitu aturan yang telah disepakati bersama-sama dengan mengacu pada peraturan dan undang-undang yang berlaku.

2. **Hak kepemilikan (*Property Right*)**, yaitu aturan yang diatur oleh hukum (formal), adat dan tradisi (non formal), atau konsesus yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat dalam hal kepentingan terhadap sumberdaya. Hak kepemilikan bukan hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif, tetapi juga hak yang ditetapkan bersama suatu kelompok masyarakat lokal. Hasil penelitian di Gapoktan Bakti Makmur, bahwa penguasaan lahan tidak ditemukan adanya hak komunal (kelompok masyarakat dari salah satu suku) atas tanah dan hutan oleh masyarakat.

Sistem penguasaan lahan oleh masyarakat berlangsung mengikuti hukum secara tradisi yaitu meneruskan pengelolaan lahan dari kakek atau nenek jaman dahulu yang sudah membuka kawasan terlebih dahulu. Selain itu ada juga masyarakat yang akan mengelola lahan mengganti rugi dari uang lahan yang didalamnya terdapat tanaman-tanaman yang sudah siap dikelola. Oleh karena itu, tanah yang telah di diganti rugi dapat dikelola oleh si pembeli secara langsung.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa kawasan hutan lindung register 30 merupakan kawasan dengan kepemilikan Negara (*state property*). Sehingga pada awalnya jika ada masyarakat yang mengelola hutan dapat dikatakan *illegal*, karena tidak memiliki bukti yang syah. Dengan adanya program HKm, masyarakat dapat mengelola kawasan dengan aman setelah keluar Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.259/39/12/2009 tentang pemberian ijin pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Gapoktan Bakti Makmur yang diperkuat dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.751/Menhut-

II/2009 tentang penetapan kawasan hutan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan seluas 12.061,30 hektar di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Maka sudah jelas bahwa kepemilikan sumber daya alam yang berada di wilayah kerja Gapoktan Bakti Makmur adalah bukan milik dari segelintir kelompok tetapi milik Negara yang harus dijaga dan dilestarikan sesuai dengan tujuan dari program HKm.

3. **Aturan Representasi**, yaitu mengatur permasalahan siapa yang berhak berpartisipasi terhadap apa dalam proses pengambilan keputusan. Kawasan hutan adalah milik negara, maka jika kawasan tersebut hanya digunakan sebagai objek untuk kepentingan ekonomi sesaat maka pemerintah harus berani mempertanggungjawabkan kepada hukum Indonesia. Kondisi di lapangan masyarakat yang tergabung dalam Gapoktan tidak hanya untuk kepentingan ekonomi saja, melainkan memanfaatkan kawasan hutan untuk kepentingan sosial, ekologi. Sehingga alokasi dan distribusi dari potensi sumberdaya yang ada di Gapoktan Bakti Makmur dapat lebih tereksplorasi untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan dalam hal pengambilan keputusan yang berhak adalah para pengurus dan anggota Gapoktan Bakti Makmur dengan melibatkan pemerintah dan pihak ke tiga yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

C. **Perilaku (*behaviour*)**, meninjau perilaku dari masing-masing pemangku kepentingan-kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat dan bagaimana kepentingannya terhadap suatu sumber daya. Di wilayah kerja Gapoktan Bakti Makmur ada beberapa lembaga yang memiliki kepentingan terhadap sumberdaya yang ada, oleh karena itu program HKm

dapat berjalan akibat dari proses kemitraan yang telah dibangun diantara *stakeholder* yang ada sejak lama.

Kemitraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Sedangkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, Pasal 1 angka 1 bahwa Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kerjasama yang ada sejak lama yaitu kerjasama antara Dishutbun Kabupaten Tanggamus dengan Gapoktan, akan tetapi dengan berjalannya program HKm telah menambah kerjasama sesama mitra kerja seperti LSM, Kementerian Kehutanan, Perguruan Tinggi, Pengusaha.

Analisis terhadap perilaku masing-masing pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sangat dipengaruhi oleh tingkat kepentingan terhadap sumberdaya. Menurut Nugroho dan Murtijo (2005) menyatakan bahwa masyarakat harus diperankan menjadi pelaku utama untuk memanfaatkan sumberdaya hutan berdasarkan nilai-nilai arif yang ada dan menerima distribusi hasil secara langsung dan optimal. Mensejahterkan masyarakat desa hutan merupakan satu rantai upaya untuk mencapai kelestarian sumber daya hutan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat berusaha menggunakan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengelola kawasan hutan dengan batas waktu 35 tahun untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Analisis stakeholder lain yang memiliki pengaruh terhadap lembaga Gapoktan yaitu Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tanggamus. Pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewenangan sangat besar untuk mengakses kawasan tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dengan didukung oleh sistem Otonomi Daerah (Otda). Pemerintah saat ini cenderung memiliki perilaku yang lebih memihak kepada masyarakat kelompok tani, hal tersebut dapat diketahui melalui wawancara dan pengamatan berbagai data yang ada tentang kecenderungan pemerintah seperti membuat dan menjalankan kebijakan tentang pengelolaan hutan untuk masyarakat, menyediakan informasi berbagai perkembangan terkini HKM, menjadi penengah dalam konflik/masalah yang timbul, pengontrol pola hubungan antara pengusaha/perusahaan dan masyarakat agar tidak terbentuk sistem yang tidak seimbang dan cenderung eksploitatif.

Saat ini yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu aplikasi kebijakan yang memihak pada kepentingan bersama sebagai wujud kemitraan antar *stakeholder* khususnya masyarakat apakah akan datang tetap berjalan atau tidak untuk masa yang akan datang. Karena kepentingan pemerintah sekaligus peluang pemerintah yang besar yaitu menyediakan kondisi yang memungkinkan bagi pelaku pembangunan. Oleh karena itu perlu adanya kontrol terhadap kebijakan yang dapat dilakukan oleh berbagai unsure seperti Perguruan Tinggi, Swasata, maupun LSM (Lembaga sosial masyarakat) untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan (*sustainable forest management*). Menurut Nugroho dan Murtijo (2005) bahwa sistem pengelolaan sumber daya hutan yang melibatkan *stakeholder* harus berpedoman pada 3 (tiga) prinsip fungsi dasar hutan

yaitu fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial. Maka ketiga prinsip tersebut harus terpatri secara seimbang dalam sistem pengelolaan sumber daya hutan yang mengedepankan aspek kelestarian, keadilan, kelanjutan. Karena hutan merupakan amanah dari generasi yang akan datang dan wajib dipertanggungjawabkan bersama.

Sebagai bentuk kontrol oleh perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, maka perguruan tinggi memiliki perilaku yang strategis. Perilaku tersebut memberikan andil yang cukup besar terhadap perkembangan informasi dan tindakan yang dilakukan dimasa yang akan datang.

Analisis mengenai perilaku LSM berbeda dengan analisis pemerintah dan perguruan tinggi, LSM memiliki perilaku yang strategis di dalam mewujudkan capaian bersama yaitu antara masyarakat dan pemerintah. Di lokasi penelitian peran LSM masih sangat sedikit, walaupun oleh masyarakat dapat dirasakan manfaatnya seperti memberikan informasi yang berkembang diluar, membantu dalam pembuatan administrasi. Perilaku yang dapat dianalisis yaitu sebagai pendamping para petani hutan, memfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, mendorong kebutuhan kelompok dalam pengelolaan hutan, membantu kelancaran kebijakan pemerintah. Proses yang dijalankan LSM di lapangan lebih matang dibandingkan dengan peran pemerintah, karena rutin melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Oleh karena itu tidak serta merta LSM dapat dikatakan tidak membantu kebijakan pemerintah, tetapi mereka memiliki kepentingan yaitu turut diikutsertakan dalam upaya pembangunan kehutanan ditempat yang telah mereka damping.

Berbeda dengan para pelaku usaha atau pengusaha yang memiliki perilaku yaitu mendapatkan keuntungan dari sumberdaya yang ada dari areal hutan kemasyarakatan. Hasil bumi dari areal hutan kemasyarakatan sangat mendukung perkembangan perekonomian masyarakat seperti Kopi, Kakao, Durian, Petai, Alpukat, Jengkol, Aren dan lain lain yang secara terus menerus memproduksi hasil. Hasil dari hutan kemasyarakatan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi tidak dalam satu kali hasil bumi kemudian penghasilanya meningkat. Tetapi hasil bumi dari areal hutan kemasyarakatan terus menerus ada sehingga hasil bumi dari areal hutan kemasyarakatan dapat menunjang perekonomian anggota Gapoktan Bakti Makmur. Perilaku pengusaha biasanya mereka ada yang menjadi pengumpul, penyalur, penjual. Pengumpul memiliki perilaku membeli dari hasil masyarakat, penyalur memiliki perilaku menyalurkan dari pengumpul kepenjual dikota, sedangkan penjual memiliki perilaku menjual dari hasil bumi yang telah diberikan oleh penyalur untuk selanjutnya dijual dipasar. Pengusaha dapat menjadi peran apa saja sehingga hal tersebut juga akan mengkhawatirkan jika pemerintah tidak memiliki peran didalamnya yaitu sebagai pengontrol pola hubungan antara pengusaha/perusahaan dengan masyarakat agar tidak terbentuk sistem yang tidak seimbang dan cenderung eksplaitatif (kepentingan satu pihak atau lebih terhadap pihak lain sebagai obyek eksploitasi), sehingga masyarakat petani tetap dirugikan. Selain itu eksploitatif diartikan bahwa keuntungan besar diambil oleh sebelah pihak yaitu pengusaha dan mengabaikan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan berupa transparansi harga.

Analisis stakeholder tersebut menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, bahwa antara satu lembaga dengan lembaga lain memiliki peran, fungsi, perilaku dan kepentingan yang berbeda-beda. Menurut Setyowati dan Suporahadjo (2008) menyatakan bahwa menjalankan lembaga *multi stakeholder* bukanlah hal yang mudah dilakukan, apalagi *stakeholder* tersebut memiliki kepentingan yang berbeda dalam pengelolaan hutan.

Adanya jaringan kerjasama dengan pihak-pihak lain sangat bermanfaat dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan di register 30 Pekon teratas Kecamatan Kota Agung. Kerjasama yang bisa dilakukan antara lain dengan pihak-pihak pemerintah daerah dan pihak ketiga yang akan memberikan bantuan modalnya di Gapoktan Bakti Makmur. Dalam kenyataan kondisi di lapangan menunjukkan sudah terbinanya kerjasama yang intensif yang dilakukan Gapoktan Bakti Makmur dengan pihak pemerintah daerah atau dinas terkait, yaitu dilakukan dengan dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus, dengan memberikan pembinaan teknis berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hutan. Dengan mencermati sejumlah kebijakan yang berkait dalam rancangan kegiatan yang bertujuan mengupayakan penyelamatan hutan, kiranya dapat ditelaah sejauh mana efektivitasnya.

Posisi peran para pihak dalam HKm menurut Wulandari, Christine (2009) bahwa perubahan mendasar dalam kebijakan HKm khususnya peran *stakeholder* yaitu :

1. Peran masyarakat lokal yang semula hanya dilibatkan sebagai buruh dalam proyek pemerintah, sangat dimungkinkan menjadi pelaku utama yang mempunyai hak mengelola /mengusahakan hutan Negara.

2. Peran Pemerintah (pusat dan daerah) yang semula sebagai Pembina yang memberikan arahan-arahan menjadi fasilitator yang memberi bimbingan dan kemudahan-kemudahan bagi berlangsungnya sebuah proses
3. Membuka ruang bagi para pihak lain untuk melakukan inisiasi sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat lokal.
4. Sejalan dengan era otonomi daerah, kewenangan pemberian ijin dan pengaturan lebih lanjut dalam operasionalisasi HKm di tingkat daerah merupakan kewenangan dan tanggung jawab bupati.

Menurut Achmad N., (2003) bahwa HKm sebagai sistem pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat intinya adalah masyarakat lokal merupakan titik sentral pelaku utama, pemerintah dan pihak lainnya berperan sebagai fasilitator yang memberi dukungan agar pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat berkembang secara adil dan lestari. Sehingga HKm juga dapat membangkitkan kegiatan ekonomi masyarakat didalam dan sekitar hutan serta mempercepat rehabilitasi hutan dengan menyatukan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.

D. Kinerja (*performance*), yaitu menggambarkan kondisi pengelolaan terhadap sumberdaya hutan apakah sudah cukup baik atau belum (Sanim, dkk. 2006). Pengelolaan terhadap sumberdaya hutan harus melihat dari aspek keheterogenan masyarakat yang tergabung didalam Gapoktan. Terbukti didalam Gapoktan terdiri dari beberapa suku yang berbeda-beda, hal tersebut berpengaruh terhadap tindakan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. Cara pandang masyarakat terhadap sumberdaya

hutan juga berbeda-beda yang berpengaruh terhadap kinerja (*performance*) dan ditentukan oleh empat hal yaitu perasaan sebagai satu masyarakat (*sense of community*), eksternalitas, homogenitas, dan skala ekonomi (*economic of scale*). Menurut Nugraha dan Murtijo (2005) homogenitas dan perasaan sebagai satu kesatuan masyarakat yang berdampingan langsung dengan sumber daya hutan lebih lebih memiliki unsur timbal balik yang kokoh, karena terikat dalam suatu sistem ekologi yaitu antara alam dan komunitas. Gapoktan Bakti Makmur memiliki anggota kelompok dengan suku yang berbeda, akan tetapi mereka menghormati aturan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Kinerja Gapoktan Bakti Makmur melalui beberapa penilaian yang telah dipaparkan diatas, mengenai demokrasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dapat diambil kesimpulan gapoktan tersebut telah menggunakan asas-asas good governance. Dalam hal demokrasi, sistem pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh anggota Gapoktan menjadi ciri bagaimana Gapoktan tersebut memperhatikan apa yang disampaikan atau dikeluhkan oleh anggotanya mengenai apa yang mereka alami di lapangan dan secara bersama mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Dalam hal partisipasi, secara umum permasalahan yang dialami oleh Gapoktan Bakti Makmur adalah permasalahan yang rata-rata dialami oleh sebuah lembaga atau organisasi. Sikap acuh yang timbul oleh sebagian anggota adalah bentuk ketidakpedulian yang hanya mencari kepentingan sendiri. Dalam pelaksanaannya, partisipasi sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan program kerja yang telah ditentukan agar tidak ada ketimpangan kepentingan antar anggota maupun pengurus.

Untuk itu dibutuhkan adanya pendekatan yang dilakukan pengurus gapoktan, ataupun anggota gapoktan lain untuk mensosialisasikan program-program yang dicanangkan tiap gapoktan dan mengajak keterlibatan anggota lain untuk kepentingan bersama.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi gambaran keberhasilan suatu lembaga atau organisasi menjaga amanah yang diberikan. Dalam hal ini, pengurus gapoktan telah melakukan tindakan yang benar dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dan menerapkan prinsip keterbukaan.

Cara pandang masyarakat dipengaruhi juga oleh skala ekonomi (*economic of scale*), yang artinya bahwa kebutuhan utama masyarakat adalah kebutuhan akan tercukupinya perekonomian dirinya dan keluarganya. Nugroho dan Murtijo (2005) menyatakan bahwa cara pandang terhadap kebutuhan masyarakat harus melakukan langkah yang mendesak yaitu identifikasi potensi sumber daya hutan yang ada, peningkatan produktivitas potensi sumber daya hutan, dan pengembangan usaha pemasaran hasil. Ketiga langkah tersebut tetap menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Di Gapoktan Bakti Makmur yang masih minim dalam pelaksanaan ketiga hal tersebut termasuk penelitian-penelitian untuk identifikasi potensi sumber daya hutan, maka kinerja dari masyarakat di lokasi penelitian masih tergantung dengan masukan atau himabauan dari pihak diluar Gapoktan walaupun inisiatif-inisiatif kecil dari anggota Gapoktan sudah ada.

Dalam pengelolaan terhadap sumber daya hutan di areal Hutan kemasyarakatan, Gapoktan Bakti Makmur memiliki andil yang cukup besar untuk melakukan

perencanaan areal kelola karena kelompok sudah memiliki wadah untuk bermusyawarah sebagai wujud dari persatuan masyarakat yang perlu untuk menyatukan persepsi tentang pengelolaan lahan yang mereka garap agar kedepan lebih baik. Menurut penelitian Kadir W (2002), tentang kinerja kelompok masyarakat dalam *social forestry* menunjukkan bahwa faktor yang dapat mendukung pengembangan *social forestry* di kawasan adalah tingginya persentase usia kerja produktif masyarakat, pekerjaan utama petani, potensi tenaga kerja keluarga, persepsi masyarakat terhadap kawasan, dan adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga kawasan hutan.

Dengan demikian dalam mewujudkan tujuan bersama yaitu hutan lestari masyarakat sejahtera, kinerja (*performance*) juga menjadi hal yang penting dalam pengelolaan sumber daya hutan di areal kelola hutan kemasyarakatan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Bakti Makmur.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan mengenai Peran Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bakti Makmur Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Register 30 Pekon Teratas Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Tahun 2010, yakni sebagai berikut:

1. Peran Gabungan Kelompok Tani Bakti Makmur dari segi situasi, kelembagaan Gapoktan Bakti Makmur merupakan lembaga kelompok tani yang sudah berbadan hukum memiliki aturan main kelompok secara tertulis yang mengatur tujuan berdirinya kelompok, hak dan kewajiban kelompok, administrasi keorganisasian kelompok, serta hubungan antara kelompok dengan para pihak lainnya, serta ada aturan dan inisiatif tidak tertulis yang mendukung pelaksanaan HKm dan diketahui oleh Dishutbun. Berbagai hal tersebut merupakan daya dukung Gapoktan Bakti Makmur dalam mengupayakan peranannya dalam melakukan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan untuk mewujudkan hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat petani hutan.
2. Peran dari segi Perilaku realisasi pengelolaan Hutan Kemasyarakatan mencakup peran dari beberapa pihak yang berkepentingan sudah terealisasi untuk pengembangan kualitas pencapaian tujuan program kerja. Jaringan kerja sama yang telah tercipta cukup membantu baik pengurus maupun anggota lain dalam

penyuluhan, pembibitan maupun penjualan hasil panen. Peran dari pemerintah dan juga LSM yang terkait diharapkan dapat menolong untuk lebih intens dan dapat memberikan solusi yang lebih menyentuh permasalahan yang ada dalam proses pelaksanaan program,

3. Adanya Gapoktan Bakti Makmur serta dukungan dari berbagai pihak telah membawa dampak positif sosial, ekonomis dan ekologis di lingkungan HKM Bakti Makmur, Dampak positif sosial dapat dilihat dari beberapa hal berikut : mulai dari terciptanya hubungan dialogis dan harmonis antara kelompok Hkm dengan pemerintah dan pihak lain dalam rangka mewujudkan hutan lestari masyarakat sejahtera, menurunnya sengketa antar sesama anggota dalam pengelolaan hamparan, adanya penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui mekanisme aturan internal kelompok, Adanya usulan kelompok kepada instansi pemerintah yang berwenang untuk penegakkan hukum terhadap sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme aturan internal kelompok. Sedangkan dampak ekonomis terlihat dari adanya peningkatan pendapatan tunai rumah tangga dan pendapatan Pemerintah kabupaten Tanggamus. Sedangkan dampak ekologis terlihat dari munculnya keragaman tanaman yang tumbuh di blok budidaya meliputi tajuk tinggi, sedang, dan rendah; serta terjadi peningkatan kesuburan tanah secara organik.
4. Kinerja Gapoktan yang terlihat baik dari segi Demokrasi, Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas telah dilakukan dengan walaupun belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Keadaan ini menggambarkan kondisi kinerja Gapoktan telah menerapkan asas *Good Governance* dengan baik.

5. Kurangnya partisipatif masyarakat dalam hal pengambilan keputusan. Masyarakat kurang dilibatkan dalam hal pengambilan keputusan terkait program kerja yang ada di Gapoktan. Penyusunan program kerja hanya ditentukan oleh pemda dan LSM

B. Saran

1. Perlunya peningkatan kualitas kelembagaan Gapoktan, seperti kualitas SDM dalam hal pengetahuan mengenai proses produksi dari mulai pembibitan sampai pemasaran. Dalam hal kepengurusan Gapoktan sosialisasi program kerja yang mencakup pemberian informasi dan hubungan komunikasi yang tetap terjalin dengan tujuan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan harus dibina antar pengurus dan anggota. Pembentukan jaringan kerja sama mulai dari Gapoktan, pemerintah, dalam hal ini Dishtubun maupun LSM yang terkait diharapkan lebih terarah untuk menjalankan program kerja yang telah ditetapkan, agar tujuan dari HKm dapat terwujud dengan baik.
2. Perlunya meningkatkan partisipatif masyarakat dengan ikut berpartisipasi baik dalam hal pengambilan keputusan termasuk dalam penyusunan program kerja maupun pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan aturan seperti pembayaran iuran dan pendaftaran anggota Gapoktan secara resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, N. 2003. Analisis Kebijakan Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sebagai Upaya Penanggulangan Kerusakan Hutan Register 19 Taman Hutan Raya Wan Abdurrachman. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Asep, A. 2004. Studi Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Register 19 Gunung Betung oleh Masyarakat di Dusun Talang Mulya Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Lampung Selatan. Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta.
- Dinas Kehutanan Propinsi Lampung. 2003. Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Propinsi Lampung. Dinas Kehutanan Propinsi Lampung. Bandar Lampung.
- Dinas Kehutanan Propinsi Lampung. 2003. Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Izin Kegiatan Hutan Kemasyarakatan di Propinsi Lampung. Dinas Kehutanan Propinsi Lampung. Bandar Lampung.
- Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 2001. Kumpulan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kehutanan. Unit KSDA Lampung. Bandar Lampung.
- Faridh, M *Struktur Kelembagaan Gapoktan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan*. Jurusan Manajemen Hutan. Fakultas Pertanian. Universitas Lampung. 2010.
- FKKM. 2004. Jurnal Kehutanan Masyarakat : Memberi Peran Pada Rakyat. FKKM. Bogor.
- Gajah Mada University Press 2006, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*,
- GKKPH. 2000. Proposal Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKM). GKKPH. Lampung.
- Harianto, S. P., Rudwan. 2005. Kualitas Hutan Provinsi Lampung, Permasalahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Bandar Lampung

- Kagungan dan Tresiana. 2004. *Buku Ajar Administrasi Pembangunan*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila.
- Milles, M.B, Micheal H. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI-Press: Jakarta.
- Moleong, Lexy J.. 2004. *Metode penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Mulyana. 2006. *Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Graha Ilmu Yogyakarta.\
- Nugraha, A., Murtijo. 2005. *Antropologi Kehutanan*. Wana Aksara. Banten : Indonesia.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2004 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan atau Sekitar Hutan dalam Rangka Social Forestry.
- Rizki Amalia, Yoshy. *Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Model KPPH BINAWA (Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan di Desa Tribudi Syukur Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat)*. Jurusan Manajemen Hutan. Fakultas Pertanian. Universitas Lampung. 2009
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama :Bandung.
- Sedarmayanti. 2007. *Good Governance & Good Corporate Governance*. Mandar Maju : Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Sosiologi Suatu Pengantar*. UI Press : Jakarta.
- Sumarto, Hetifah. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta : Bandung.
- WG Pemberdayaan Departemen Kehutanan RI. *Hutan Kemasyarakatan: Kebijakan dan Mekanisme Kelembagaan*.2009.
- Wulandari, Christine. 2009. *Buku Ajar Hutan Kemasyarakatan*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.